

LAPORAN AKHIR INDEKS WILLIAMSON

BALAIKOTA
SURAKARTA

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)
SURAKARTA, 2018**



PRAKATA

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik, hidayah dan kekuatannya sehingga penulisan Laporan Akhir Indeks Williamson. Laporan ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada pihak pemberi tugas dalam hal Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta.

Tim kajian mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak terutama segenap pimpinan dan pegawai di Bappeda Kota Surakarta yang telah membantu mengalokasikan anggaran, support data, dan memberikan berbagai masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dalam menyelesaikan dan menyempurnakan kajian ini.

Semoga kajian dapat bermanfaat untuk kemajuan pembangunan di Kota Surakarta.

Surakarta, 2018

Tim Kajian

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	4
1.3. Manfaat	4
1.4. Lingkup Kegiatan	4
1.5. Sistematika	5
BAB II KONDISI MAKRO EKONOMI KOTA SURAKARTA	7
2.1. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	7
2.2. Kemiskinan dan Ketimpangan di Surakarta	16
2.3. Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surakarta	25
BAB III KONSEP DAN METODE KAJIAN	31
3.1. Aspek Kependudukan dalam Pembangunan Daerah	31
3.2. Pengangguran, Kemiskinan, Pembangunan Ekonomi Lokal	35
3.3. Kependudukan dan Pertumbuhan Ekonomi	38
3.4. Kemiskinan	40
3.5. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi	42
3.6. Konsentrasi Kemiskinan	45
3.7. Metodologi	46
3.7.1. Pendekatan Kajian	46
3.7.2. Sumber dan Ketersediaan Data	47
3.7.3. Prosedur Penentuan PDRB Kecamatan	48
3.7.4. Kerangka Pikir Kajian	49
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	50
4.1. Proxy PDRB Kecamatan	50
4.1.1. Pendekatan Proporsi PDRB	51
4.1.2. Pendekatan Proporsi Jumlah Penduduk ..	52
4.2. Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antarkecamatan	53
4.3. Konsentrasi Kemiskinan	57
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	62

5.1. Kesimpulan	62
5.2. Rekomendasi Kebijakan	63
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Kecamatan	8
Tabel 2.2.	Distribusi Kelompok Umur dan Rasio jenis Kelamin	8
Tabel 2.3.	Angkatan Kerja Kota Surakarta 2017	10
Tabel 2.4.	Angkatan Kerja Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Tahun 2017	11
Tabel 2.5.	Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Surakarta, 2017	12
Tabel 2.6.	Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Lapangan Usaha, 2017	13
Tabel 2.7.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Tahun 2017	14
Tabel 2.8.	Perbandingan Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2017	16
Tabel 2.9.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan 2010-2017	19
Tabel 2.10.	Perbandingan Indeks Gini 2010-2015	23
Tabel 2.11.	Perbandingan Pertumbuhan Sektor Ekonomi 2011 dan 2017	27
Tabel 2.12.	Perbandingan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Antar Daerah Jawa Tengah Tahun 2011-2017	29
Tabel 4.1.	PDRB Kecamatan Harga Konstan Tahun 2000	51
Tabel 4.2.	Proporsi PDRB Kecamatan Harga Konstan Tahun 2000	52
Tabel 4.3.	Proxy PDRB Kecamatan Tahun 2010-2017 ..	52
Tabel 4.4.	Distribusi Proporsi Penduduk Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2010-2017	52
Tabel 4.5.	Proxy PDRB Kecamatan Tahun 2010-2017 Pendekatan Proporsi Jumlah Penduduk	53
Tabel 4.6.	Indeks Williamson Tahun 2010-2017 Pendekatan Proporsi PDRB.....	54

Tabel 4.7.	Indeks Williamson Tahun 2010-2017 Pendekatan Proporsi Jumlah Penduduk	54
Tabel 4.8.	Indeks Williamson Tahun 2010-2017 Pendekatan Rata-rata dari Proporsi PDRB dan Jumlah Penduduk	55
Tabel 4.9.	Jumlah Keluarga Miskin Masing-masing Kecamatan di Surakarta Tahun 2012-2017	58
Tabel 4.10.	Nilai Indeks Theil Masing-masing Kecamatan di Surakarta Tahun 2010-2017	59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Perkembangan Perbandingan Garis Kemiskinan Tahun 2010-2017.....	21
Grafik 2.2.	Perbandingan Pengeluaran Perkapita Riil Tahun 2010-2017	22
Grafik 2.3.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2011-2017.....	26
Grafik 2.4.	Pola Fluktuasi Indeks Williamson antar Kecamatan	56
Grafik 2.5.	Indeks Williamson Kota Surakarta Tahun 2010-2017	57
Grafik 2.6.	Pola Nilai Indeks Theil Masing-masing Kecamatan di Surakarta Tahun 2012-2017 .	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi daerah dengan aspek kependudukan memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan penduduk dan pembangunan ekonomi mengandung beberapa makna yang penting. *Pertama*, kependudukan, atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan. Pembangunan baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas. *Kedua*, keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan. *Ketiga*, dampak dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang, sering kali permasalahan penduduk dalam pembangunan terabaikan.

Aspek kependudukan dalam pembangunan daerah membawa beberapa permasalahan. *Pertama*, pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa konsekuensi munculnya permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Pemerintah daerah memiliki tugas dan kewajiban untuk menjamin setiap penduduk mendapatkan kesejahteraan. Tingginya pertumbuhan penduduk di daerah membuat tugas tersebut perlu mendapatkan perhatian ekstra. *Kedua*, pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa dampak pada meningkatnya angka penduduk usia kerja (penduduk yang berusia 15 tahun ke atas) dan hal ini memperbesar jumlah angkatan kerja. Peningkatan angkatan kerja mengharuskan

pemerintah daerah untuk mampu mendorong dan memberikan stimulus yang mengarah pada peningkatan pemberdayaan masyarakat, bahkan pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan lapangan kerja. *Ketiga*, pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menciptakan kemiskinan dan ketimpangan, apabila tidak diikuti dengan kualitas sumber daya manusia serta pertumbuhan ekonomi daerah yang mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah sebagai berikut: (1) peningkatan standar hidup setiap orang, (2) penciptaan berbagai kondisi yang memnungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri, dan (3) peningkatan kebebasan setiap orang. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah daerah menyusun kebijakan yang diharapkan mampu menghilangkan atau mengurangi permasalahan yang sering muncul dalam pembangunan, sehingga langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah diharapkan mampu: (1) mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah, (2) memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, (3) menciptakan atau menambah lapangan kerja, (4) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dan (5) menjaga kelestarian sumberdaya alam.

Di sisi lain dalam pembangunan daerah seringkali terjadi munculnya “rantai yang hilang” dalam arti bahwa kinerja pembangunan ekonomi daerah justru tidak mampu menekan tingkat kemiskinan secara signifikan dan menyebabkan peningkatan disparitas atau kesenjangan distribusi pendapatan yang semakin melebar. Dalam teori *trickle down effect*, hasil pembangunan daerah tidak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat atau tidak menetes ke bawah. Bila kondisi ini terjadi, pembangunan daerah berhasil dari aspek ukuran makroekonomi daerah, namun belum mencapai tujuan dan sasaran seperti yang diharapkan. Kondisi ini memunculkan adanya *trade off* antara pertumbuhan dan pemerataan. Dari sisi pertumbuhan, pembangunan daerah dikatakan berhasil apabila terbukti terjadi kenaikan output yang terukur dari nilai PDRB

yang bersumber dari sektoral ekonomi. Di sisi yang lain, dari aspek pemerataan belum dapat dikatakan berhasil apabila pertumbuhan yang terjadi tidak diikuti oleh aspek pemerataan. Bila kondisi ini terjadi, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk seperti yang telah disebutkan menjadi tidak berhasil, atau dapat pula terjadi situasi dimana pertumbuhan ekonomi daerah tinggi, namun tidak diikuti dengan pengurangan tingkat kemiskinan dan disparitas.

Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di berbagai negara ternyata tidak mereduksi kemiskinan, dan kesenjangan distribusi pendapatan semakin melebar. Beberapa penelitian lain menghasilkan kondisi yang berbeda yaitu pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan secara langsung, atau penurunan tingkat kemiskinan terjadi melalui penurunan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan demikian tidak dapat disimpulkan secara cepat bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan, namun pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu prasyarat dalam pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan.

Atas dasar hal tersebut sangat penting bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk mengkaji apakah pembangunan ekonomi yang telah terjadi selama ini mampu menekan angka kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan agar pembangunan ekonomi mampu secara nyata menekan angka kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan, sehingga tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai mengingat tujuan pembangunan bukan semata-mata kenaikan pertumbuhan ekonomi semata, namun juga memiliki dimensi lain yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan sebagai salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.

1.2. TUJUAN

Tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji kondisi makroekonomi Kota Surakarta yang dikaitkan dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan
- b. Mengukur dan menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan antarkecamatan di Kota Surakarta
- c. Mengukur dan menganalisis ketimpangan atau konsentrasi kemiskinan antarkecamatan di Kota Surakarta

1.3. MANFAAT

Melalui kajian ini diharapkan dapat diketahui dan dianalisis kondisi makroekonomi Kota Surakarta yang dititikberatkan pada relevansinya dengan permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan dan ketimpangan kemiskinan antarkecamatan di wilayah Kota Surakarta.

Dengan demikian, akan diperoleh informasi yang lebih komprehensif dan analitis perbandingan kondisi ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan antarkecamatan di Kota Surakarta sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan kebijakan dan strategi guna mengatasi permasalahan tersebut.

1.4. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan ini meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan, yang dirinci sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis kondisi makroekonomi Kota Surakarta yang dititikberatkan pada relevansinya dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.
- b. Melakukan pengukuran serta menganalisis tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Kota Surakarta serta masing-masing kecamatan di Kota Surakarta.
- c. Melakukan pengukuran serta menganalisis tingkat ketimpangan kemiskinan Kota Surakarta serta masing-masing kecamatan di Kota Surakarta.

- d. Merumuskan usulan kebijakan dan strategi dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.

1.5. SISTEMATIKA

Sistematika Laporan Evaluasi Kinerja Perekonomian Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, serta lingkup kegiatan dari kajian tentang ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan antarkecamatan di Kota Surakarta. Latar belakang dalam bab ini menguraikan dasar serta arti penting dari kajian ini.

BAB II : KONDISI MAKROEKONOMI KOTA SURAKARTA

Dalam bab ini akan diuraikan kondisi makroekonomi Kota Surakarta secara umum serta relevansi kondisi tersebut dengan aspek kependudukan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas dan focus mengenai ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan dalam konteks makroekonomi Kota Surakarta.

BAB III : KONSEP DAN METODE KAJIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang dasar teori yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL ANALISIS

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis umum kondisi makroekonomi Kota Surakarta yang dititikberatkan pada perbandingan antarkecamatan dan memiliki relevansi dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan, serta hasil pengukuran dan analisis ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan antarkecamatan.

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis dan pembahasan ketimpangan distribusi pendapatan antarkecamatan serta kemiskinan di Kota Surakarta.

BAB II

KONDISI MAKROEKONOMI KOTA SURAKARTA

2.1. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Ketimpangan memiliki relevansi erat dengan masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Ketimpangan dipengaruhi bukan saja dari aspek pendapatan, namun juga struktur penduduk baik dari sisi jumlah, usia, latar belakang pekerjaan, dan sebagainya. Semakin besar jumlah penduduk berpotensi mendorong semakin besar pula kemungkinan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan.

Berdasarkan data Disdukcapil Kota Surakarta, pada Tahun 2017 jumlah penduduk Kota Surakarta mencapai 562.269 jiwa. Perbandingan antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan relatif hampir seimbang, yaitu laki-laki sebanyak 276.685 dan perempuan 285.584. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sebesar 96,88; yang berarti bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 97 penduduk laki-laki. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Banjarsari dan yang paling sedikit berada di Kecamatan Banjarsari sebanyak 178.849 atau 31,81% dan kedua adalah Kecamatan Jebres yang mencapai 144.175 jiwa atau 25,64%. Kecamatan Serengan memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 53.923 atau hanya 9,59%.

Meski Kecamatan Banjarsari memiliki jumlah penduduk terbanyak, namun karena memiliki area paling luas, kepadatan penduduk tertinggi bukanlah Kecamatan Banjarsari melainkan Kecamatan Pasar Kliwon. Tingkat kepadatan penduduk menggambarkan perbandingan jumlah penduduk dengan total luas wilayah. Kecamatan Banjarsari memiliki tingkat kepadatan sebesar 12.076 per km² sementara Pasar Kliwon memiliki tingkat kepadatan 17.453 per km². Secara keseluruhan tingkat kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2017 mencapai 12.767 per km².

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Luas Wilayah (KM ²)	Kepadatan Penduduk
	Kode	Nama	Orang	%		
1	33.72.01	LAWEYAN	101,196	18.00%	8.64	11,712.50
2	33.72.02	SERENGAN	53,923	9.59%	3.19	16,903.76
3	33.72.03	PASAR KLIWON	84,126	14.96%	4.82	17,453.53
4	33.72.04	JEBRES	144,175	25.64%	12.58	11,460.65
5	33.72.05	BANJARSARI	178,849	31.81%	14.81	12,076.23
Jumlah			562,269	100.00%	44.04	12,767.23

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, 2017

Dari aspek kelompok umur, penduduk dengan usia terbanyak adalah kelompok umur 35-39 tahun yang mencapai 47.176 orang atau 8,39%. Meski ini merupakan kelompok umur dengan jumlah penduduk terbanyak, namun sebenarnya dibandingkan dengan kelompok umur yang lain tidak memiliki selisih jumlah yang signifikan, terutama hingga kelompok umur usia 55-59 tahun. Rasio jenis kelamin usia 0 hingga 29 tahun memiliki nilai di atas 100 (lebih banyak laki-laki dibanding perempuan), dan usia 30 tahun ke atas memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100.

Tabel 2.2.
Distribusi Kelompok Umur dan Rasio jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Pria	Wanita	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	0-4	19,586	19,043	38,629	102.85
2	5-9	22,745	21,615	44,360	105.23
3	10-14	22,985	21,897	44,882	104.97
4	15-19	21,949	21,588	43,537	101.67
5	20-24	20,989	20,474	41,463	102.52
6	25-29	19,714	19,505	39,219	101.07

No	Kelompok Umur	Pria	Wanita	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
7	30-34	21,911	21,941	43,852	99.86
8	35-39	23,525	23,651	47,176	99.47
9	40-44	21,194	21,541	42,735	98.39
10	45-49	19,647	21,020	40,667	93.47
11	50-54	17,476	19,812	37,288	88.21
12	55-59	15,356	17,128	32,484	89.65
13	60-64	12,070	12,940	25,010	93.28
14	65-69	7,585	8,522	16,107	89.00
15	70-74	4,212	5,813	10,025	72.46
16	>=75	5,741	9,094	14,835	63.13
Jumlah		276,685	285,584	562,269	96.88

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, 2017

Penduduk usia kerja Kota Surakarta pada tahun 2017 mencapai 410.000 orang terdiri dari 197.088 laki-laki dan 213.685 perempuan. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan dan bukan angkatan kerja, dan angkatan kerja sendiri terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka.

Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut, jumlah angkatan kerja Kota Surakarta sebesar 271.527 orang. Dengan demikian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2017 mencapai 66,10%. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, angkatan kerja laki-laki berjumlah 147.504 dan perempuan sebanyak 124.023.

Jumlah pengangguran di Kota Surakarta per Agustus 2017 mencapai 12.133 terdiri dari 6.553 laki-laki dan 5.580 perempuan. Dengan demikian tingkat pengangguran di Kota Surakarta mencapai 4,47%. Tingkat pengangguran ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 4,57%

Tabel 2.3.
Angkatan Kerja Kota Surakarta 2017

Kegiatan	Jenis Kelamin (Orang)		Total
	Laki laki	Perempuan	
ANGKATAN KERJA	147504	124023	271527
Bekerja	140951	118443	259394
Pengangguran	6553	5580	12133
BUKAN ANGKATAN KERJA	49584	89662	139246
Sekolah	24899	25440	50339
Mengurus Rumah Tangga	10999	56581	67580
Lainnya	13686	7641	21327
PENDUDUK USIA KERJA	197088	213685	410773

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2017

Sebagian besar angkatan kerja tersebut berpendidikan SMTA, yaitu 127.813 atau sebesar 47,07% dan yang terkecil berpendidikan diploma yaitu 17.512 atau 6,45%. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sebanyak 12.133 orang merupakan pengangguran, sehingga tingkat pengangguran tahun 2017 mencapai 4,47%. Dari jumlah pengangguran yang ada, pengangguran terbesar adalah mereka yang berpendidikan SMTA, yaitu 6.797 atau 50,02% dari total jumlah penganggur. Jumlah lulusan sarjana yang menganggur di Kota Surakarta adalah 1.177 orang atau sebesar 9,70% dari total jumlah penganggur.

Tabel 2.4.
Angkatan Kerja Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan Tertinggi
Tahun 2017

Kegiatan	Pendidikan (Orang)					Jumlah
	SD	SMTp	SMTA	DI/II/III/ AKADEMI	UNIVERSITAS	
ANGKATAN KERJA	43505	45854	127813	17512	36843	271527
Bekerja	42326	44078	121016	16308	35666	259394
Pengangguran	1179	1776	6797	1204	1177	12133
BUKAN ANKATAN KERJA	24909	43701	56084	4245	10307	139246
Sekolah	3586	27146	18447	863	297	50339
Mengurus Rumah Tangga	14839	13174	28759	2707	8101	67580
Lainnya	6484	3381	8878	675	1909	21327
PENDUDUK USIA KERJA	68414	89555	183897	21757	47150	410773

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2017

Dari sisi jumlah penduduk yang bekerja, sebanyak sebagian besar penduduk yaitu 106.513 orang atau 41,06% berprofesi sebagai tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar dan yang terkecil adalah tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan yang mencapai 1.341 atau 0,52%. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis Surakarta yang menyebabkan sulitnya sektor tersebut untuk berkembang. Dengan melihat banyaknya penduduk yang bekerja di bidang tenaga penjualan, tenaga usaha jasa, serta tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar, maka Kota Surakarta dapat digambarkan sebagai kota perdagangan, jasa, dan industri yang didukung dengan bidang transportasi.

Tabel 2.5.
Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Surakarta, 2017

Jenis Pekerjaan/Jabatan	Pendidikan (Orang)				Universitas	Total
	SD	SMTP	SMTA	Diploma I/II/III/ Akademi		
Tenaga profesional, teknisi dan yang sejenis	0	518	6019	3796	14609	24942
Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan	0	596	741	435	670	2442
Tenaga tata usaha dan yang sejenis	685	1357	8883	3312	5663	19900
Tenaga usaha penjualan	11137	6308	32187	3524	9556	62712
Tenaga usaha jasa	11338	5994	16172	1001	1756	36261
Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan	0	0	454	280	607	1341
Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar	18272	28629	52847	3960	2805	106513
Lainnya	894	676	3713	0	0	5283
Jumlah	42326	44078	121016	16308	35666	259394

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2017

Bila dikaitkan dengan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan lapangan usaha atau sector ekonomi, maka terlihat sebagian besar penduduk yaitu 100.971 atau 38,93% bekerja di sector perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, selanjutnya sector jasa kemasyarakatan yaitu sebesar 65.854 atau 25,39% dan urutan ketiga adalah sector industri pengolahan yaitu 54.184 atau 20,89%.

Di sector industri pengolahan, sebagian besar adalah pekerja yang berpendidikan SMTA. Demikian pula dengan sector jasa kemasyarakatan dan sector perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebagian besar adalah berpendidikan SMTA. Mereka yang berpendidikan sarjana sebagian besar bekerja di sector jasa kemasyarakatan dan disusul kemudian

sector perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel. Sementara itu mereka yang berpendidikan SD sebagian besar bekerja di sector perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel.

Tabel 2.6.
Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Lapangan Usaha, 2017

Lapangan Usaha	Pendidikan (Orang)				Universitas	Total
	SD	SMTP	SMTA	Diploma I/II/III/Akademi		
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	0	0	454	280	607	1341
Pertambangan dan penggalian	0	0	0	438	0	438
Industri Pengolahan	5378	11616	30636	2071	4483	54184
Listrik, gas dan air	0	0	1601	0	0	1601
Bangunan	1940	3151	1559	263	0	6913
Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	18482	14822	51601	5891	10175	100971
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	2269	2922	6187	1292	1224	13894
Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan	603	2185	3159	2026	6225	14198
Jasa kemasyarakatan	13654	9382	25819	4047	12952	65854
Jumlah	42326	44078	121016	16308	35666	259394

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2017

Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah termasuk

pemerintah daerah. Pengangguran akan mendorong timbulnya permasalahan social lainnya. Oleh karena itu kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang ditempuh harus diarahkan pada upaya pengurangan tingkat pengangguran. Kenaikan jumlah pengangguran yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja akan mendorong peningkatan tingkat pengangguran, namun bila kenaikan jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah pengangguran, maka tingkat pengangguran akan turun.

Tingkat pengangguran di Surakarta pada tahun 2017 mencapai 4,47%. Jumlah ini tergolong kecil bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran di provinsi Jawa Tengah dan nasional. Bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah, posisi Surakarta berada di tengah-tengah yaitu peringkat 18 dari 35.

Tabel 2.7.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran (%)	Peringkat
Kabupaten Semarang	1.78	1
Kabupaten Sukoharjo	2.27	2
Kabupaten Wonogiri	2.38	3
Kabupaten Magelang	2.44	4
Kabupaten Blora	2.85	5
Kabupaten Temanggung	2.97	6
Kabupaten Grobogan	3.02	7

Kabupaten Karanganyar	3.17	8
Kabupaten Rembang	3.19	9
Kabupaten Kudus	3.56	10
Kabupaten Purworejo	3.64	11
Kabupaten Boyolali	3.67	12
Kabupaten Pati	3.83	13
Kota Salatiga	3.96	14
Kabupaten Wonosobo	4.18	15
Kabupaten Klaten	4.35	16
Kabupaten Pekalongan	4.39	17
Kota Surakarta	4.47	18
Kabupaten Demak	4.47	19
Kabupaten Sragen	4.55	20
Kabupaten Banyumas	4.62	21
Kabupaten Banjarnegara	4.72	22
Kabupaten Jepara	4.84	23
Kabupaten Kendal	4.93	24
Kota Pekalongan	5.05	25
Kabupaten Purbalingga	5.33	26
Kabupaten Kebumen	5.58	27
Kabupaten Pemalang	5.59	28
Kabupaten Batang	5.82	29
Kabupaten Cilacap	6.30	30
Kota Semarang	6.61	31
Kota Magelang	6.68	32

Kabupaten Tegal	7.33	33
Kabupaten Brebes	8.04	34
Kota Tegal	8.19	35

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2017, diolah

2.2. Kemiskinan dan Ketimpangan di Kota Surakarta

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam kemiskinan, terdapat dua ukuran yang dipergunakan, yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan. Dalam hal tingkat kedalaman kemiskinan, pada tahun 2017 Kota Surakarta memiliki nilai 1,71 (peringkat 20) dengan rata-rata selama 2010-2017 sebesar 1,68 sedangkan dalam tingkat keparahan kemiskinan sebesar 0,44 (peringkat 22) dengan rata-rata selama 2010-2017 sebesar 0,39. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tingkat provinsi Jawa Tengah. Selama 2010-2017 setiap tahun tingkat kedalaman kemiskinan Kota Surakarta rata-rata turun sebesar -2,23% dan tingkat keparahan kemiskinan rata-rata turun sebesar -2,62% per tahun.

Tabel 2.8.
Perbandingan Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)
dan Tingkat Keparahannya Kemiskinan (P2) Tahun 2017

Wilayah Jateng	P1	P2	Rata-rata 2010-2017		Rata-rata Pertumbuhan 2010-2017	
	2017	2017	P1	P2	P1	P2
PROVINSI JAWA TENGAH	2.21	0.57	2.38	0.61	-2.40	-2.49
Kabupaten Cilacap	1.98	0.42	2.44	0.61	-5.94	-8.96
Kabupaten Banyumas	3.19	0.85	3.20	0.84	-1.56	-2.15

Wilayah Jateng	P1	P2	Rata-rata 2010-2017		Rata-rata Pertumbuhan 2010-2017	
	2017	2017	P1	P2	P1	P2
Kabupaten Purbalingga	2.79	0.68	3.41	0.87	-5.02	-6.40
Kabupaten Banjarnegara	3.25	0.84	3.18	0.83	-0.39	-1.29
Kabupaten Kebumen	3.62	0.99	3.60	0.93	-0.23	1.05
Kabupaten Purworejo	2.25	0.54	2.43	0.60	-2.42	-2.61
Kabupaten Wonosobo	3.85	1.1	4.15	1.19	-0.40	0.13
Kabupaten Magelang	1.67	0.31	1.89	0.41	-2.89	-5.48
Kabupaten Boyolali	1.96	0.53	2.14	0.55	-2.50	-4.09
Kabupaten Klaten	2.46	0.61	2.60	0.66	-2.56	-2.91
Kabupaten Sukoharjo	0.93	0.17	1.26	0.27	-6.95	-9.43
Kabupaten Wonogiri	1.8	0.43	2.11	0.52	-7.13	-10.30
Kabupaten Karanganyar	1.85	0.43	2.04	0.48	-0.97	-2.13
Kabupaten Sragen	1.93	0.42	2.51	0.64	-5.42	-6.25
Kabupaten Grobogan	2.03	0.56	2.32	0.56	-2.82	1.06
Kabupaten Blora	1.53	0.31	2.15	0.51	-6.12	-9.22
Kabupaten Rembang	3.24	0.89	3.18	0.78	-1.10	1.00
Kabupaten Pati	1.44	0.35	1.88	0.45	-7.20	-9.05
Kabupaten Kudus	1	0.21	0.96	0.18	1.20	3.96
Kabupaten Jepara	0.98	0.22	1.07	0.22	-1.89	0.00
Kabupaten Demak	2.2	0.59	2.55	0.65	-7.34	-8.98

Wilayah Jateng	P1	P2	Rata-rata 2010-2017		Rata-rata Pertumbuhan 2010-2017	
	2017	2017	P1	P2	P1	P2
Kabupaten Semarang	1.1	0.25	1.34	0.32	-3.87	-3.03
Kabupaten Temanggung	1.81	0.43	1.75	0.38	0.65	3.41
Kabupaten Kendal	1.69	0.39	2.12	0.58	-9.80	-15.80
Kabupaten Batang	1.51	0.31	1.82	0.42	-5.78	-7.62
Kabupaten Pekalongan	1.73	0.36	1.92	0.41	-4.57	-5.38
Kabupaten Pemalang	3.52	1	3.06	0.77	1.42	3.24
Kabupaten Tegal	1.27	0.27	1.45	0.33	-4.71	-3.64
Kabupaten Brebes	3.06	0.78	3.55	0.93	-4.65	-5.63
Kota Magelang	1.3	0.32	1.37	0.31	-3.01	-2.79
Kota Surakarta	1.87	0.44	1.68	0.39	-2.23	-2.62
Kota Salatiga	0.85	0.21	0.92	0.20	-1.43	3.96
Kota Semarang	0.54	0.12	0.67	0.15	-6.89	-9.95
Kota Pekalongan	0.92	0.2	1.02	0.20	-2.65	0.74
Kota Tegal	1.42	0.38	1.34	0.33	-2.70	-2.07

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Secara umum, tingkat kemiskinan Kota Surakarta selama 2010-2017 rata-rata mencapai 11,70% dan masuk dalam peringkat 11 dari seluruh daerah di Jawa Tengah. Dalam hal pertumbuhan tingkat kemiskinan per tahun, Kota Surakarta selama 2010-2017 memiliki rata-rata pertumbuhan -3,79% yang berarti setiap tahun rata-rata tingkat kemiskinan turun sebesar 3,79%. Angka penurunan ini tergolong tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain.

Tabel 2.9.

Perbandingan Tingkat Kemiskinan 2010-2017

KAB/KOTA	RATA-RATA 2010-2017	PERINGKAT
Kota Semarang	5.07	1
Kota Salatiga	6.36	2
Kabupaten Kudus	8.31	3
Kota Pekalongan	8.54	4
Kabupaten Semarang	8.78	5
Kabupaten Jepara	9.05	6
Kota Tegal	9.12	7
Kota Magelang	9.64	8
Kabupaten Sukoharjo	9.76	9
Kabupaten Tegal	10.70	10
Kota Surakarta	11.70	11
Kabupaten Batang	12.03	12
Kabupaten Temanggung	12.22	13
Kabupaten Kendal	12.50	14
Kabupaten Pati	12.79	15
Kabupaten Boyolali	13.05	16
Kabupaten Karanganyar	13.31	17

KAB/KOTA	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PERINGKAT
Kota Salatiga	-6.77	1
Kabupaten Demak	-4.68	2
Kabupaten Batang	-4.28	3
Kabupaten Semarang	-4.19	4
Kabupaten Grobogan	-4.15	5
Kabupaten Tegal	-3.93	6
Kota Surakarta	-3.79	7
Kota Tegal	-3.78	8
Kabupaten Purbalingga	-3.76	9
Kabupaten Kendal	-3.72	10
Kabupaten Cilacap	-3.67	11
Kabupaten Pekalongan	-3.59	12
Kabupaten Rembang	-3.41	13
Kabupaten Pati	-3.38	14
Kabupaten Jepara	-3.18	15
Kota Pekalongan	-3.17	16
Kabupaten Sukoharjo	-3.14	17

KAB/KOTA	RATA-RATA 2010-2017	PERINGKAT
Kabupaten Magelang	13.52	18
Kabupaten Pekalongan	13.64	19
Kabupaten Wonogiri	13.98	20
Kabupaten Blora	14.43	21
Kabupaten Grobogan	14.98	22
Kabupaten Purworejo	15.23	23
Kabupaten Cilacap	15.32	24
Kabupaten Demak	15.64	25
Kabupaten Klaten	15.66	26
Kabupaten Sragen	15.72	27
Kabupaten Banjarnegara	18.47	28
Kabupaten Banyumas	18.50	29
Kabupaten Pemasang	18.83	30
Kabupaten Rembang	20.61	31
Kabupaten Brebes	20.72	32
Kabupaten Purbalingga	20.74	33
Kabupaten Kebumen	21.31	34

KAB/KOTA	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PERINGKAT
Kabupaten Blora	-3.11	18
Kabupaten Sragen	-3.11	19
Kabupaten Klaten	-2.97	20
Kabupaten Wonogiri	-2.74	21
Kabupaten Purworejo	-2.60	22
Kabupaten Brebes	-2.60	23
Kota Magelang	-2.58	24
Kabupaten Kudus	-2.42	25
Kabupaten Banyumas	-2.39	26
Kabupaten Temanggung	-2.27	27
Kabupaten Kebumen	-2.08	28
Kabupaten Pemasang	-1.97	29
Kabupaten Boyolali	-1.94	30
Kabupaten Wonosobo	-1.85	31
Kabupaten Magelang	-1.84	32
Kabupaten Karanganyar	-1.84	33
Kabupaten Banjarnegara	-1.53	34

KAB/KOTA	RATA-RATA 2010-2017	PERINGKAT
Kabupaten Wonosobo	21.92	35

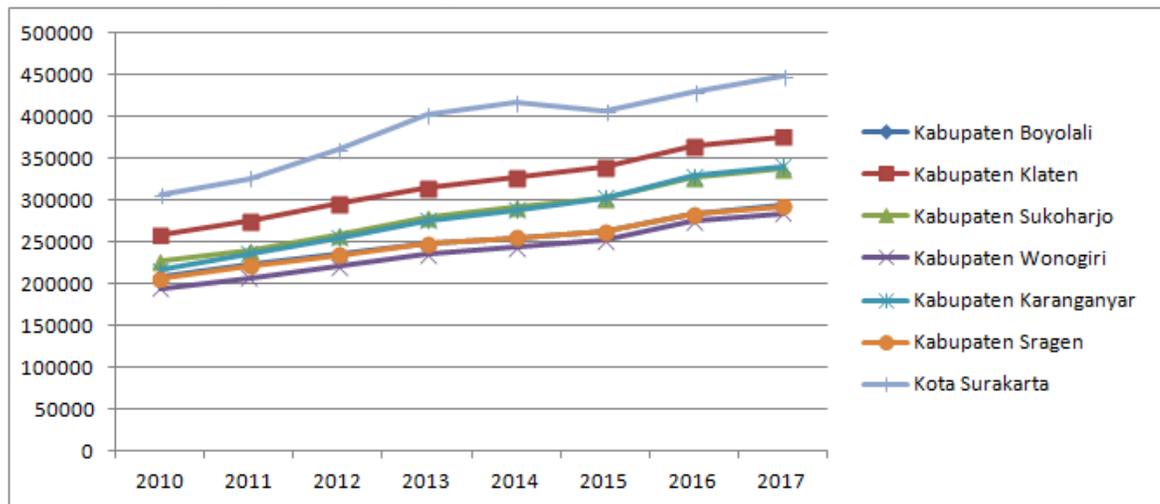
KAB/KOTA	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PERINGKAT
Kota Semarang	-1.46	35

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Dari aspek garis kemiskinan bila dibandingkan dengan beberapa daerah sekitar Kota Surakarta memiliki garis kemiskinan yang tertinggi yaitu Rp448.062 perkapita per bulan. Kondisi ini merupakan indikasi bahwa standar hidup di Kota Surakarta lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah sekitar. Di Kota Surakarta penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita per bulan kurang dari Rp448.062 masuk dalam kelompok miskin, sementara di daerah sekitar lainnya tidak demikian.

Grafik 2.1.

Perkembangan Perbandingan Garis Kemiskinan Tahun 2010-2017



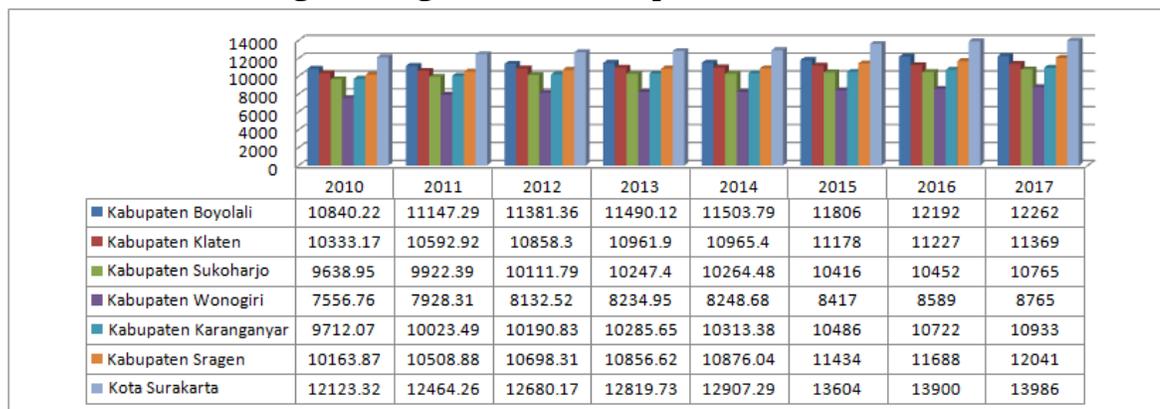
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Selama 2010-2017 terlihat garis kemiskinan terus mengalami kenaikan dan posisi Kota Surakarta di atas daerah lainnya. Garis kemiskinan Kota Surakarta sempat mengalami penurunan pada tahun 2014-2015 dari Rp417.807 menjadi Rp406.840 atau turun sebesar -2,6% sementara daerah lain tidak mengalami hal tersebut, namun setelah itu menunjukkan kenaikan yang cukup tajam dibandingkan dengan daerah lain.

Kemiskinan berpengaruh langsung dengan konsumsi penduduk. Hal ini akan terlihat dari besarnya pengeluaran perkapita riil penduduk. Pengeluaran penduduk yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk semakin tinggi pula sehingga semakin jauh dari kategori miskin. Berdasarkan hal tersebut, rata-rata pengeluaran perkapita riil penduduk Kota Surakarta tahun 2017 mencapai Rp13.986.000. Angka ini adalah yang tertinggi dibandingkan dengan beberapa daerah lain di sekitar Kota Surakarta. Pengeluaran tersebut sedikit tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 yang besarnya mencapai Rp13.900.000. Sepanjang 2010-2017, rata-rata pengeluaran perkapita riil Kota Surakarta mengalami kenaikan tertinggi di tahun 2015, yaitu naik sebesar 5,39% dibandingkan tahun 2014. Bila dikaitkan dengan data garis kemiskinan, pengeluaran perkapita riil memiliki pola yang sama dengan.

Grafik 2.2.

Perbandingan Pengeluaran Perkapita Riil Tahun 2010-2017



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Di dalam permasalahan ketimpangan yang diukur dengan indeks Gini, Kota Surakarta memiliki rata-rata nilai indeks Gini sebesar 0,30 selama 2010-2015. Angka ini meski tergolong masih dalam batas wajar, namun perlu mendapatkan perhatian mengingat angka 0,3 masuk dalam kelompok batas atas. Nilai indeks Gini yang mendekati 0,40 dianggap sudah menjadi permasalahan serius dalam distribusi pendapatan atau ketimpangan.

Nilai indeks Gini Kota Surakarta tersebut masuk dalam peringkat 32 dari 35 daerah di Jawa Tengah. Dari sisi rata-rata pertumbuhan tiap tahun, nilai indeks Gini Kota Surakarta memiliki rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,69%. Meski angka rata-rata pertumbuhan ini tergolong kecil secara relatif (dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah), namun secara absolute termasuk tinggi. Penyebab tingginya indeks Gini bersifat multi dimensi, seperti factor ekonomi, social, kebijakan daerah, maupun budaya.

Tabel 2.10
Perbandingan Indeks Gini 2010-2015

KAB/KOTA	RATA-RATA 2010-2017	PERINGKAT	KAB/KOTA	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PERINGKAT
Kabupaten Pemalang	0.23	1	Kota Semarang	-0.99	1
Kabupaten Pekalongan	0.24	2	Kabupaten Sukoharjo	0.81	2
Kabupaten Pati	0.24	3	Kabupaten Sragen	1.35	3
Kabupaten Rembang	0.25	4	Kabupaten Banyumas	1.39	4
Kabupaten Jepara	0.25	5	Kota Magelang	1.45	5
Kabupaten Batang	0.25	6	Kabupaten Batang	1.56	6

Kabupaten Kebumen	0.26	7
Kabupaten Kudus	0.26	8
Kabupaten Brebes	0.26	9
Kabupaten Demak	0.26	10
Kota Tegal	0.26	11
Kabupaten Grobogan	0.26	12
Kabupaten Tegal	0.27	13
Kabupaten Purbalingga	0.27	14
Kabupaten Semarang	0.27	15
Kabupaten Cilacap	0.27	16
Kabupaten Banjarnegara	0.27	17
Kabupaten Magelang	0.27	18
Kota Pekalongan	0.27	19
Kabupaten Boyolali	0.27	20
Kabupaten Wonogiri	0.27	21
Kabupaten Sukoharjo	0.28	22
Kabupaten Kendal	0.28	23
Kabupaten Klaten	0.28	24
Kabupaten Wonosobo	0.28	25

Kota Surakarta	1.69	7
Kabupaten Purbalingga	1.79	8
Kabupaten Boyolali	1.79	9
Kabupaten Kebumen	1.94	10
Kabupaten Brebes	1.94	11
Kabupaten Pemalang	2.27	12
Kota Salatiga	2.27	13
Kabupaten Temanggung	2.30	14
Kota Tegal	2.31	15
Kabupaten Pekalongan	2.51	16
Kota Pekalongan	2.64	17
Kabupaten Tegal	2.74	18
Kabupaten Kendal	2.94	19
Kabupaten Pati	2.96	20
Kabupaten Semarang	2.96	21
Kabupaten Karanganyar	3.03	22
Kabupaten Rembang	3.06	23
Kabupaten Banjarnegara	3.26	24
Kabupaten Wonogiri	3.39	25

Kabupaten Purworejo	0.28	26	Kabupaten Wonosobo	3.46	26
Kabupaten Sragen	0.28	27	Kabupaten Demak	3.54	27
Kabupaten Blora	0.29	28	Kabupaten Cilacap	3.60	28
Kabupaten Banyumas	0.30	29	Kabupaten Grobogan	3.60	29
Kabupaten Karanganyar	0.30	30	Kabupaten Klaten	3.66	30
Kota Magelang	0.30	31	Kabupaten Jepara	3.69	31
Kota Surakarta	0.30	32	Kabupaten Magelang	3.96	32
Kabupaten Temanggung	0.31	33	Kabupaten Kudus	4.19	33
Kota Semarang	0.31	34	Kabupaten Purworejo	4.37	34
Kota Salatiga	0.31	35	Kabupaten Blora	4.55	35

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

2.3. Pertumbuhan Ekonomi di Surakarta

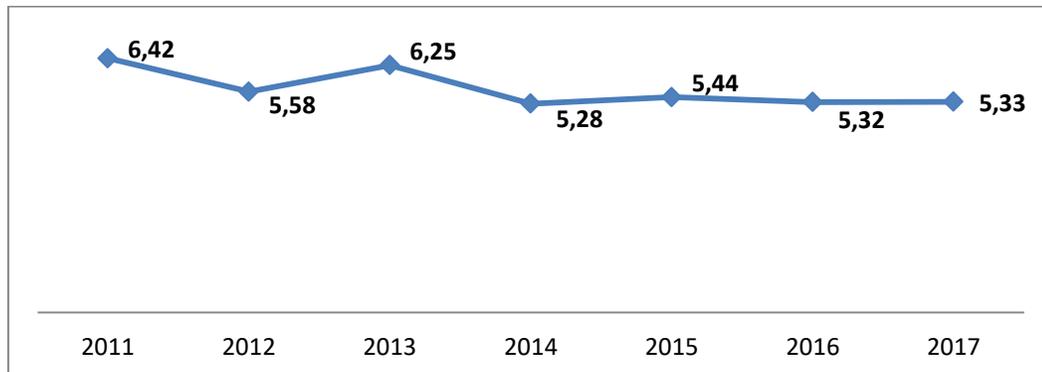
Permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh berbagai daerah, bahkan negara. Ketimpangan ini dapat memicu berbagai permasalahan sosial lainnya sehingga memerlukan perhatian khusus, karena tidak jarang aspek ketimpangan ini kurang mendapatkan respon yang cepat mengingat ketimpangan merupakan sesuatu yang abstrak, hanya sebagai sebuah indikator.

Faktor yang menjadi penyebab ketimpangan bersifat multidimensi dan saling terkait. Secara umum, ketimpangan distribusi pendapatan merupakan akibat pertumbuhan ekonomi atau hasil pembangunan yang terjadi belum mampu dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta sepanjang 2011-2017 menunjukkan tren yang menurun, namun dipandang

masih cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan Jawa Tengah dan nasional.

Grafik 2.3.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2011-2017



Sumber: BPS Kota Surakarta, diolah.

Dari grafik di atas pertumbuhan ekonomi selama 2011-2017 menunjukkan penurunan cukup besar di tahun 2014 dan selanjutnya mulai 2014 hingga 2017 pertumbuhan ekonomi terlihat stagnan. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2014 dari 6,25% di tahun 2013 menjadi hanya 5,28% di tahun 2014 disebabkan karena cukup banyak sektor ekonomi yang memiliki proporsi tinggi mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2014. Sektor konstruksi misalnya, pada tahun 2013 tumbuh sebesar 3,92% dan tahun 2014 turun menjadi 3,65% padahal sektor ini memiliki pangsa sekitar 26%. Demikian pula dengan sektor perdagangan yang mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -3,17% dari 2013 ke 2014 dan pangsa sektor ini juga cukup besar yaitu 24%. Sektor industri pengolahan pun juga menunjukkan penurunan pertumbuhan sebesar -2,16% dari 2013 ke 2014.

Bila dibandingkan pertumbuhan dari 2011 ke 2017 terlihat sebagian besar sektor menunjukkan penurunan. Penurunan pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor jasa pendidikan dari 13,06% di tahun 2011 menjadi hanya 4,52% di

tahun 2017 atau mengalami penurunan sebesar -8,54%. Sektor lain yang juga menunjukkan penurunan pertumbuhan adalah sektor jasa perusahaan dari 11,19% di tahun 2011 menjadi hanya 3,97% di tahun 2017 atau mengalami penurunan sebesar -7,22%. Demikian pula dengan beberapa sektor lain yang menunjukkan penurunan pertumbuhan secara variatif.

Tabel 2.11.
Perbandingan Pertumbuhan Sektor Ekonomi 2011 dan 2017

Sektor	Pertumbuhan 2011	Pertumbuhan 2017	Naik/Turun
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.24	3.84	-4.40
Pertambangan dan Penggalian	-5.32	-0.39	4.92
Industri Pengolahan	6.76	4.20	-2.56
Pengadaan Listrik dan Gas	8.17	4.27	-3.90
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.36	5.68	3.33
Konstruksi	1.91	4.96	3.05
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.45	5.49	-4.96
Transportasi dan Pergudangan	4.54	5.70	1.16
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.16	4.41	-3.75
Informasi dan Komunikasi	8.50	8.95	0.45
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.50	4.26	-0.24
Real Estate	7.09	5.16	-1.93
Jasa Perusahaan	11.19	3.97	-7.22
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.81	1.24	-1.57
Jasa Pendidikan	13.06	4.52	-8.54
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12.05	6.77	-5.28

Sektor	Pertumbuhan 2011	Pertumbuhan 2017	Naik/Turun
Jasa lainnya	3.27	6.86	3.59
PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010	6.42	5.33	-1.09

Sumber: BPS Kota Surakarta, diolah.

Posisi pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta tergolong cukup bagus bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari indikator rata-rata pertumbuhan ekonomi yang diukur menggunakan rata-rata geometric. Selama 2011-2017, Blora memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi paling tinggi. Tingginya rata-rata pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan karena pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Blora sangat tinggi yaitu 23,52%. Tingginya pertumbuhan ini akibat besarnya kontribusi dari sektor minyak dan gas. Bila sektor minyak dan gas diabaikan, maka pertumbuhan ekonomi Blora tahun 2016 hanya sebesar 5,7%.

Kota Surakarta masuk dalam peringkat 9 dari 35 daerah di Jawa Tengah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 2011-2017 sebesar 5,64%. Bila diperhatikan, sebagian besar daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang menurun meski *smooth*. Hal ini berarti fenomena penurunan tren pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena umum yang juga terjadi di daerah lain, tidak hanya Kota Surakarta saja. Beberapa daerah di sekitar Kota Surakarta menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, seperti Sragen (6,07%), Sukoharjo (5,72%), Boyolali (5,66%), dan Klaten (5,60%).

Tabel 2.12.
Perbandingan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi
Antar Daerah Jawa Tengah Tahun 2011-2017

PERINGKAT	KABUPATEN / KOTA REGENCY / MUNICIPALITY	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Blora	4.42	4.90	5.36	4.39	5.36	23.53	5.84	6.26
2	Banyumas	6.61	5.88	6.97	5.67	6.12	6.05	6.34	6.22
3	Sragen	6.55	6.12	6.70	5.59	6.05	5.74	5.81	6.07
4	Kota Semarang	6.58	5.97	6.25	6.31	5.82	5.84	5.64	6.05
5	Kab. Semarang	6.27	6.03	5.97	5.85	5.52	5.27	5.47	5.76
6	Sukoharjo	5.88	5.90	5.78	5.40	5.69	5.71	5.72	5.72
7	Tegal	6.39	5.23	6.73	5.03	5.49	5.92	5.38	5.71
8	Boyolali	6.34	5.33	5.83	5.42	5.96	5.30	5.52	5.66
9	Surakarta	6.42	5.58	6.25	5.28	5.44	5.32	5.33	5.64
10	Salatiga	6.58	5.53	6.30	5.57	5.17	5.22	5.21	5.63
11	Kendal	6.57	5.21	6.22	5.14	5.21	5.53	5.57	5.61
12	Klaten	6.29	5.71	5.96	5.84	5.30	5.14	5.07	5.60
13	Pati	5.91	5.93	5.97	4.64	6.01	5.46	5.40	5.60
14	Brebes	6.65	4.58	5.91	5.30	5.98	5.08	5.47	5.53
15	Magelang	6.68	4.88	5.91	5.38	5.18	5.37	5.06	5.47
16	Pekalongan	5.49	5.61	5.91	5.48	5.00	5.36	5.32	5.45
17	Rembang	5.19	5.32	5.43	5.15	5.50	5.23	6.18	5.42
18	Magelang	6.11	5.37	6.04	4.98	5.11	5.17	5.18	5.41
19	Pemalang	5.01	5.32	5.57	5.52	5.58	5.38	5.39	5.39
20	Banjarnegara	5.44	5.23	5.44	5.31	5.47	5.41	5.42	5.39
21	Karanganyar	4.95	5.90	5.69	5.22	5.05	5.37	5.52	5.38
22	Batang	6.12	4.62	5.88	5.31	5.42	4.98	5.29	5.35
23	Tegal	6.47	4.21	5.67	5.04	5.45	5.44	5.46	5.35
24	Kebumen	6.15	4.88	4.57	5.79	6.28	4.97	4.89	5.32
25	Purbalingga	5.67	5.79	5.27	4.85	5.47	4.78	5.12	5.27
26	Pekalongan	5.66	4.81	5.99	4.95	4.78	5.16	5.28	5.22
27	Jepara	4.92	5.86	5.39	4.81	5.10	5.02	5.13	5.17
28	Demak	5.39	4.46	5.27	4.29	5.93	5.05	5.56	5.11
29	Temanggung	6.09	4.27	5.20	5.03	5.24	4.98	4.68	5.04
30	Purworejo	5.64	4.59	4.94	4.48	5.33	5.12	5.14	5.02
31	Wonogiri	3.58	5.94	4.78	5.26	5.40	5.23	5.17	5.00

32	Grobogan	3.19	5.08	4.57	4.07	5.96	4.46	5.65	4.63
33	Wonosobo	5.37	4.70	4.00	4.78	4.67	5.13	3.16	4.49
34	Kudus	4.24	4.11	4.36	4.43	3.88	2.52	2.97	3.71
35	Cilacap	4.07	1.98	1.66	2.92	5.96	5.06	2.45	3.12

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

BAB III

KONSEP DAN METODE KAJIAN

3.1. Aspek Kependudukan dalam Pembangunan Daerah

Dalam konteks pembangunan di daerah, secara internal penduduk dapat dipandang dari dua sisi, yaitu kekuatan (potensi) atau kelemahan. Penduduk akan menjadi suatu kekuatan atau potensi pembangunan di daerah apabila penduduk di daerah tersebut mampu berperan secara aktif sebagai subyek pembangunan daerah. Untuk dapat berperan sebagai subyek pembangunan, penduduk haruslah memiliki kriteria minimal sebagai berikut: *pertama*, penduduk memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Hal ini dapat ditunjukkan antara lain melalui tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagai besar penduduk. Hasil studi empiris yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk berpengaruh secara signifikan dalam kemajuan atau pembangunan daerah. *Kedua*, penduduk memiliki rasio ketergantungan yang kecil, artinya struktur penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif diharapkan mampu memberikan kontribusi dan partisipasi yang lebih besar dalam pembangunan daerah. Struktur penduduk yang didominasi oleh usia tidak produktif (anak-anak dan orang tua atau manula) dapat menghambat progresivitas pembangunan daerah. *Ketiga*, laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mendorong semakin besarnya beban rumah tangga melalui tingginya tingkat konsumsi terutama makanan. Hal ini akan menjadikan lambatnya tujuan pembangunan daerah sesuai dengan yang diharapkan.

Penduduk merupakan pusat dari kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan penduduk merupakan permasalahan pembangunan dalam jangka panjang dan permasalahan tersebut membawa implikasi yang luas dalam pembangunan daerah. Atas dasar hal tersebut, penting bagi

daerah untuk merumuskan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Pembangunan berwawasan kependudukan berorientasi pada pendekatan *'bottom-up planning'*. Melalui pendekatan ini, tujuan utama seluruh proses pembangunan adalah lebih memeratakan kesejahteraan penduduk daripada mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena itu pendekatan *'bottom-up'* berupaya mengoptimalkan penyebaran sumberdaya yang dimiliki dan potensial ke seluruh wilayah dan membangun sesuai dengan potensi dan masalah khusus yang dihadapi oleh daerah masing-masing. Pendekatan *bottom-up* mengisyaratkan kebebasan daerah atau wilayah untuk merencanakan pembangunan sendiri sesuai dengan keperluan dan keadaan daerah masing-masing. Oleh karena itu otonomi yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masing-masing daerah agar mampu mengatur dan menjalankan berbagai kebijaksanaan yang dirumuskan sendiri guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah atau kawasan yang bersangkutan. Melalui otonomi daerah, yang berarti adalah desentralisasi pembangunan, maka laju pertumbuhan antar daerah akan semakin seimbang dan serasi, sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya semakin merata di seluruh Indonesia.

Terdapat beberapa ciri kependudukan di masa mendatang yang harus dicermati dalam konteks pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ciri-ciri kependudukan tersebut antara lain:

1. Penduduk di masa depan akan semakin tinggi pendidikannya.

Penduduk yang makin berpendidikan dan sehat akan membentuk sumber daya manusia yang makin produktif. Tantangannya adalah menciptakan lapangan kerja yang memadai. Sebab bila tidak, jumlah penganggur yang makin berpendidikan akan bertambah. Keadaan ini dengan sendirinya merupakan pemborosan terhadap investasi nasional. Karena sebagian besar dana tercurah dalam sektor

pendidikan, disamping kemungkinan terjadinya implikasi sosial lainnya yang mungkin timbul.

2. Penduduk yang makin sehat dan angka harapan hidup naik.

Usia harapan hidup yang tinggi dan jumlah penduduk lanjut semakin besar akan juga menuntut kebijaksanaan-kebijaksanaan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Suatu tantangan pula untuk dapat memanfaatkan penduduk usia lanjut yang masih potensial agar dapat dimanfaatkan sesuai pengetahuan dan pengalamannya.
3. Penduduk akan bergeser ke usia yang lebih tua.

Pada saat ini telah terjadi proses transisi umur penduduk Indonesia dari penduduk muda ke penduduk tua (*ageing process*). Pergeseran struktur umur muda ke umur tua produktif akan membawa konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan terutama pendidikan tinggi dan kesempatan kerja. Sedang pergeseran struktur umur produktif ke umur tua pada akhirnya akan mempunyai dampak terhadap persoalan penyantunan penduduk usia lanjut. Bersamaan dengan perubahan sosial ekonomi diperkirakan akan terjadi pergeseran pola penyantunan usia lanjut dari keluarga kepada institusi. Apabila hal ini terjadi, maka tanggung jawab pemerintah akan semakin berat.
4. Penduduk yang tinggal di perkotaan semakin banyak.

Seiring dengan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat, presentase penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat dari tahun ke tahun. Masalah urbanisasi akan menjadi masalah yang semakin menonjol. Penduduk perkotaan akan bertambah terus sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, tuntutan fasilitas perkotaan akan bertambah pula. Tambahan volume fasilitas perkotaan akan sangat berpengaruh terhadap keadaan dan perkembangan fisik kota yang bersangkutan. Meningkatnya sarana perhubungan dan komunikasi antar daerah, termasuk di daerah perdesaan, menyebabkan orang dari perdesaan tidak perlu lagi melakukan migrasi dan berdiam di daerah perkotaan. Mereka cukup menuju daerah

perkotaan manakala diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dalam kurun waktu harian, mingguan, bahkan bulanan. Dengan semakin berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi, pola mobilitas penduduk seperti itu akan semakin banyak dilakukan, sementara migrasi permanen cenderung akan makin menurun.

5. Jumlah rumah tangga akan meningkat namun ukurannya makin kecil.

Perubahan pola kelahiran dan kematian akan berpengaruh pada struktur rumahtangga. Dimasa depan ukuran rumah tangga akan semakin mengecil, namun jumlahnya akan semakin banyak. Dengan makin sedikitnya jumlah anak yang dimiliki dan disertai dengan peningkatan kesehatan penduduk, seiring tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih baik, memberikan kesempatan pula bagi individu maupun keluarga untuk melakukan mobilitas ke daerah lain.

6. Intensitas mobilitas penduduk yang makin tinggi.

Mobilitas penduduk yang makin tinggi baik secara internal maupun internasional menuntut jaringan prasarana yang makin baik dan luas. Selain itu akan membawa kepada pergeseran norma-norma masyarakat, seperti ikatan keluarga dan kekerabatan. Kesemuanya ini dapat membawa dampak yang berjangka panjang terhadap perubahan sosial budaya masyarakat.

7. Masih tingginya pertumbuhan angkatan kerja.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan kerjanya pun cukup tinggi. Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja tersebut di satu pihak menuntut kesempatan kerja yang lebih besar. Di pihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri agar mampu menghasilkan keluaran yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas.

8. Terjadi perubahan lapangan kerja.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, lapangan pekerjaan penduduk berubah dari yang bersifat primer, seperti pertanian, pertambangan, menuju lapangan pekerjaan sekunder atau bangunan. Lalu pada akhirnya akan menuju lapangan kerja tersier atau sektor jasa. Berbagai ciri dan fenomena di atas sudah sepantasnya diamati secara seksama, dalam rangka menetapkan alternatif kebijaksanaan selanjutnya.

Berdasarkan ciri-ciri kependudukan di masa mendatang, maka perlu dirumuskan *grand design* kependudukan. *Grand design* ini diperlukan khususnya untuk mendukung keberhasilan pembangunan. *Grand design* meliputi tiga aspek yaitu: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, serta pembangunan keluarga. Aspek ketiga merupakan aspek yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui penguatan pembangunan karakter di keluarga.

3.2. Pengangguran, Kemiskinan, Pembangunan Ekonomi Lokal

Masalah kependudukan yang seringkali dihadapi adalah masalah yang berkaitan erat dengan pengangguran. Pengangguran sendiri muncul akibat dari kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan penawaran tenaga kerja. Tingginya penawaran kerja diakibatkan oleh meningkatnya angkatan kerja, sedangkan peningkatan angkatan kerja merupakan dampak dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Dalam angkatan kerja, jumlah penduduk yang tidak bekerja mencerminkan tingkat pengangguran yang terjadi. Pengangguran yang terjadi di suatu daerah berdampak pada tingkat kemiskinan karena kebutuhan hidup tidak dapat dipenuhi akibat tidak tersediannya lapangan kerja. Oleh karena itu semakin meningkatnya proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas perlu diperhatikan, mengingat hal ini dapat mendorong terjadinya pengangguran apabila penduduk 15 tahun ke atas tersebut tidak bersekolah dan tidak

bekerja. Pengangguran yang terjadi memiliki dampak langsung terhadap kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas aspek kehidupan. Ahli ekonomi Amartya K. Sen menyatakan, kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan mencapai standar hidup.

Salah satu strategi mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang banyak ditempuh oleh suatu negara berkembang adalah pengembangan ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi kerakyatan bukanlah berarti menutup pengembangan sektor industri, perdagangan, maupun sektor jasa yang berskala besar, namun pengertian pengembangan ekonomi kerakyatan adalah upaya pemberdayaan masyarakat secara luas dan nyata dalam aktivitas ekonomi berdasarkan pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal yang didukung dengan sumberdaya manusia yang terampil. Pengembangan potensi ekonomi lokal tersebut diarahkan pada pengembangan skala usaha yang lebih besar, sehingga tercipta keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang (*forward* dan *backward linkage*).

Pembangunan ekonomi lokal menurut Bank Dunia (2001) adalah “..*the process by which actors within cities and towns – our community – works collectively with public, business and non governmental sector partners to create better conditions for economic growth and employment generation.*”. Definisi ini mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi lokal: (1) melibatkan interaksi komponen masyarakat, (2) bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Lebih lanjut Bank Dunia mengatakan bahwa untuk mengembangkan ekonomi lokal, daerah perlu fokus pada: (1) penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, (2) pengembangan sumberdaya manusia, (3) kemitraan masyarakat dan pemerintah, (4) mendorong investasi swasta ke barang publik, dan (5) membangun daya saing lokasi.

Pengertian lain dari ekonomi lokal dikemukakan oleh Blakely dan Bradshaw, yaitu proses dimana pemerintah daerah

dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut International Labour Organization (ILO), pembangunan ekonomi lokal adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya local dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.

Definisi ekonomi lokal menurut Helming adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu, menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik.

Pengembangan ekonomi lokal menurut Yoga (Bappenas, 2007) memfokuskan kepada:

1. Peningkatan kandungan lokal;
2. Pelibatan *stakeholders* secara substansial dalam suatu kemitraan strategis;
3. Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi;
4. Pembangunan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal;
6. Pengembangan usaha kecil dan menengah;
7. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif;
8. Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
9. Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah;
10. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.

Sasaran dari pengembangan ekonomi lokal pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif.
2. Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara *stakeholder* secara sinergis.
3. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal.
4. Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan.
5. Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB.
6. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan.
7. Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah.
8. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

Atas dasar hal tersebut di atas, pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka pembedayaan ekonomi masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, dengan penekanan pada keterlibatan masyarakat, partisipasi pemerintah daerah, serta pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

3.3. Kependudukan dan Pertumbuhan Ekonomi

Penduduk terbagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah

penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Pengertian “bekerja” menurut BPS adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Menurut BPS, penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung dengan cara:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Menurut hukum Okun (Okun’s Law) pengangguran memiliki hubungan negative dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin rendah tingkat pengangguran yang terjadi. Output dari perekonomian tergantung dari tenaga kerja yang dipergunakan dalam proses produksi sehingga terdapat hubungan positif antara output dengan tenaga kerja. Mengingat angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka, maka semakin tinggi output semakin tinggi jumlah penduduk yang bekerja dan semakin rendah pengangguran.

Namun penelitian hubungan antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara menghasilkan

kesimpulan yang berbeda-beda. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak berdiri sendiri, namun juga dipengaruhi variable lain seperti pengeluaran pemerintah, kebijakan ekonomi dan keuangan, dan sebagainya. Artinya, pertumbuhan ekonomi misal 2% tidak secara otomatis akan mengurangi tingkat pengangguran 2% pula.

3.4. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari.

Kondisi kemiskinan menurut BPS dapat diukur dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Berbagai studi yang dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu secara signifikan mengurangi

tingkat kemiskinan, seperti Ravallion dan Chen (1997)¹ serta Adam (2002)². Penelitian lain seperti Lin di China (2008)³ dan HBhanumurthy dan HMitra (2004)⁴ di India juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Kemiskinan sendiri dikenal dalam dua bentuk, kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. BPS memberikan pengertian bahwa kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkanakan tetapi (lebih lanjut dari itu!) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Di dalam kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau

¹ Ravallion, M dan S Chen (1997) 'What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes in Distribution and Poverty?' World Bank Economic Review. Vol. 11(2).

² Adams, R (2002) Economic Growth, Inequality and Poverty: Findings from a New Data Set, Policy Research Working Paper 2972, World Bank, February 2002.

³ Lin (2003), Economic Growth, Income Inequality, and Poverty Reduction in People's Republic of China, Asian Development Review, vol. 20, no. 2.

⁴ HBhanumurthy and HMitra (2004), Economic Growth, Poverty, and Inequality in Indian States in the Pre-reform and Reform Periods, Asian Development Review, vol. 21, no. 2

oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia.

Selanjutnya dikatakan bahwa kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogianya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, kemiskinan dalam berbagai bentuk dan pengertiannya merupakan masalah yang dapat muncul setiap saat sepanjang waktu di setiap daerah. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal, baik karena proses pembangunan itu sendiri maupun karena struktur dan kultur masyarakat.

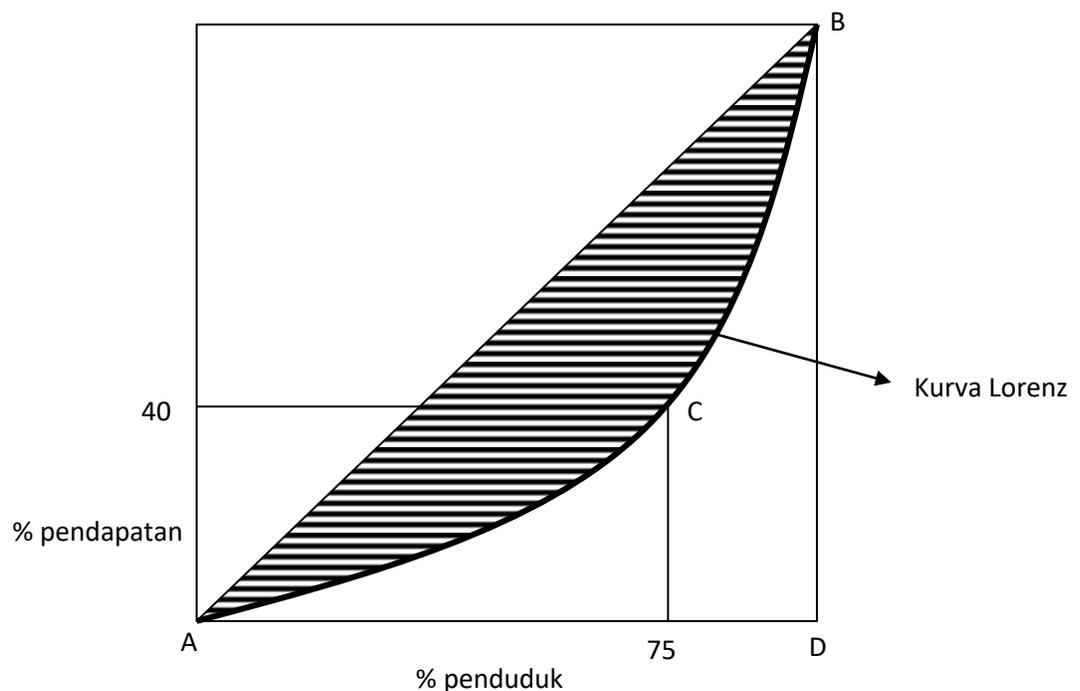
1.5. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan per kapita diukur dengan cara membagi PDB atau PNB dengan jumlah penduduk. PDB atau PNB yang dipergunakan bisa berupa PDB atau PNB riil (atas dasar harga konstan), bisa pula PDB atau PNB harga berlaku. Jumlah penduduk yang dipergunakan adalah jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pendapatan per kapita dipergunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah secara umum. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi pula kemakmuran penduduk wilayah tersebut. Pendapatan perkapita tidak memiliki

hubungan dengan tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, artinya Negara yang pendapatan perkapita nya tinggi, bisa saja ketimpangannya juga tinggi. Bila hal tersebut terjadi, berarti struktur ekonomi wilayah tersebut masih tergantung pada sekelompok masyarakat tertentu. Analisis ketimpangan diperlukan mengingat apakah hasil pembangunan daerah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan lebih adil. Bila indeks ini semakin baik maka tingkat kesejahteraan masyarakat baik antar individu dan wilayahnya akan semakin membaik pula.

Ketimpangan diukur dengan menggunakan Gini Ratio, yang diturunkan dari Kurva Lorenz. Semakin tinggi nilai Gini Ratio, berarti kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal, dan distribusi pendapatan semakin tidak merata (ketimpangan semakin tajam).



Contoh di atas: 75% penduduk menguasai 40% pendapatan (berarti 25% penduduk menguasai 60% pendapatan). Koefisien Gini= ABC/ABD .

Selain itu ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar wilayah dapat diukur dengan indeks Williamson sebagai berikut:

$$\text{Indeks Williamson (IW)} = \left\{ \frac{\sum (Y - Y_i)^2 F_i / N}{Y} \right\}^{0,5}$$

Di mana

Y = income riil per kapita kabupaten/kota

Y_i = income perkapita kecamatan

F_i = jumlah penduduk kecamatan

N = jumlah penduduk kabupaten/kota

Dari analisis ini selanjutnya dapat pula dibuat tipologi klasen dengan 4 kuadran

- a. Ketimpangan tinggi dan kemiskinan tinggi
- b. Ketimpangan tinggi dan kemiskinan rendah
- c. Ketimpangan rendah dan kemiskinan tinggi
- d. Ketimpangan rendah dan kemiskinan rendah

Teori tentang ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dikemukakan oleh Kuznets yang menunjukkan bahwa hubungan antara ketimpangan dengan pendapatan per kapita membentuk kurva U terbalik (inverted U shape). Pada intinya, teori tersebut menyatakan bahwa ketimpangan mula-mula akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, hingga pada tahap tertentu ketimpangan akan menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hipotesis Kuznets tersebut tidak berlaku mutlak karena karakteristik yang berbeda antar wilayah. Selain itu, ketimpangan juga terkait dengan banyak hal.

Ketimpangan berkaitan dengan pengangguran dan kemiskinan, dan dalam hal ini pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi pengurangan kemiskinan sedangkan syarat kecukupannya (sufficient condition) adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut harus menyebar di setiap golongan baik secara langsung maupun tak langsung. Secara langsung mengandung

arti bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi di sektor-sektor yang di dalamnya banyak penduduk berpenghasilan rendah yang bekerja. Secara tidak langsung mengandung arti bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mendistribusikan pertumbuhan ekonomi dari sektor lain yang tidak didominasi penduduk berpenghasilan rendah ke golongan penduduk yang berpenghasilan rendah.

3.6. Konsentrasi Kemiskinan

Untuk melihat bagaimana pola konsentrasi kemiskinan di Indonesia digunakan indeks Entropy Theil. Kelebihan indeks Entropy Theil dibandingkan dengan indeks konsentrasi spasial lainnya adalah bahwa pada suatu titik waktu, indeks ini menyediakan ukuran derajat konsentrasi (ataupun dispersi) distribusi spasial pada sejumlah daerah dan sub daerah dalam suatu negara.

Nilai indeks Entropy Theil yang lebih rendah menunjukkan kesenjangan yang lebih rendah, dan sebaliknya. Karakteristik utama dari indeks Entropy Theil ini adalah kemampuannya untuk membedakan kesenjangan antar daerah (between-region inequality) dan kesenjangan dalam satu daerah (withinregion inequality)

Indeks Theil dirumuskan sebagai berikut:

$$IT = \sum (x_j / X) x \text{Log} \left(\frac{x_j / X}{y_j / Y} \right)$$

IT=Indeks Entropi Theil

x_j =jumlah penduduk miskin di wilayah (kecamatan)

X=rata-rata jumlah penduduk miskin di Kota Surakarta

y_j =jumlah penduduk di wilayah (kecamatan)

Y=Jumlah penduduk di Kota Surakarta

Intensitas kemiskinan juga merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat keparahan kemiskinan di suatu daerah. Menurut KPPOD Departemen Daam Negeri, kriteria tingkat keparahan kemiskinan dinyatakan sebagai berikut:

Sangat Tinggi	: apabila $I \leq \text{mean} + \text{Sd}$
Tinggi	: apabila $\text{mean} + 0,5\text{Sd} \leq I < \text{mean} + \text{Sd}$
Sedang	: apabila $\text{mean} - 0,5\text{Sd} \leq I < \text{mean} + 0,5\text{Sd}$
Rendah	: apabila $I < \text{mean} - 0,5\text{Sd}$

Dalam hal ini, I =indikator tertentu yang dipergunakan (misal Gini Ratio, Indeks Williamson, atau Indeks Theil), mean =rata-rata hitung, Sd =deviasi standar.

3.7. Metodologi

3.7.1. Pendekatan Kajian

Untuk menghitung Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil dibutuhkan data PDRB dan kemiskinan di kecamatan. Data PDRB kecamatan dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan proporsi

PDRB kecamatan saat ini diproxy berdasarkan PDRB kecamatan tahun yang sebelumnya. Bila misal PDRB Tahun 2011 adalah 100 milyar, maka akan ditentukan proporsi PDRB tersebut di masing-masing kecamatan. Selanjutnya proporsi tersebut dipergunakan sebagai proxy PDRB tahun-tahun mendatang

b. Pendekatan Konsumsi Rumah Tangga

Dalam pendekatan pengeluaran atau penggunaan, PDRB merupakan penjumlahan dari konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nirlaba, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor netto. Peranan konsumsi rumah tangga cukup besar dalam PDRB, sehingga pendekatan konsumsi rumah tangga dapat dijadikan dasar untuk mengestimasi PDRB level kecamatan sebagai berikut:

$$\text{PDRB Kecamatan} = \text{Share konsumsi kecamatan}/100 \times \text{PDRB Kota Surakarta}$$

c. Pendekatan Penduduk yang Bekerja

PDRB menurut produksi mengandung makna bahwa PDRB merupakan total seluruh nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi, sementara tenaga kerja merupakan salah satu factor yang mempengaruhi produksi selain modal dan teknologi. Suplai dari tenaga kerja adalah penduduk, yang dalam hal ini merupakan penduduk usia kerja. Dengan demikian, untuk mengestimasi PDRB level kecamatan dengan menganggap factor selain tenaga adalah *ceteris paribus*, sehingga hanya factor tenaga kerja yang berpengaruh terhadap output produksi dan factor lainnya konstan. Atas dasar hal tersebut PDRB di tingkat kecamatan diproxy dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PDRB Kecamatan} = \text{Share jumlah penduduk kecamatan yang bekerja}/100 \times \text{PDRB Kota Surakarta}$$

Dalam hal jumlah penduduk yang bekerja di tingkat kecamatan tidak tersedia, proxy dilakukan dengan menggunakan share jumlah penduduk masing-masing kecamatan.

3.7.2. Sumber dan Ketersediaan Data

Data dalam kajian ini bersumber dari BPS Kota Surakarta berupa Kota Surakarta Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, serta PDRB Kota Surakarta. Ketersediaan data adalah sebagai berikut:

- a. PDRB Kecamatan Tahun 2011 dan 2012
- b. PRDB Kecamatan Tahun 2010 (*berdasarkan data pertumbuhan PDRB di tahun 2011*)
- c. Jumlah penduduk per kecamatan

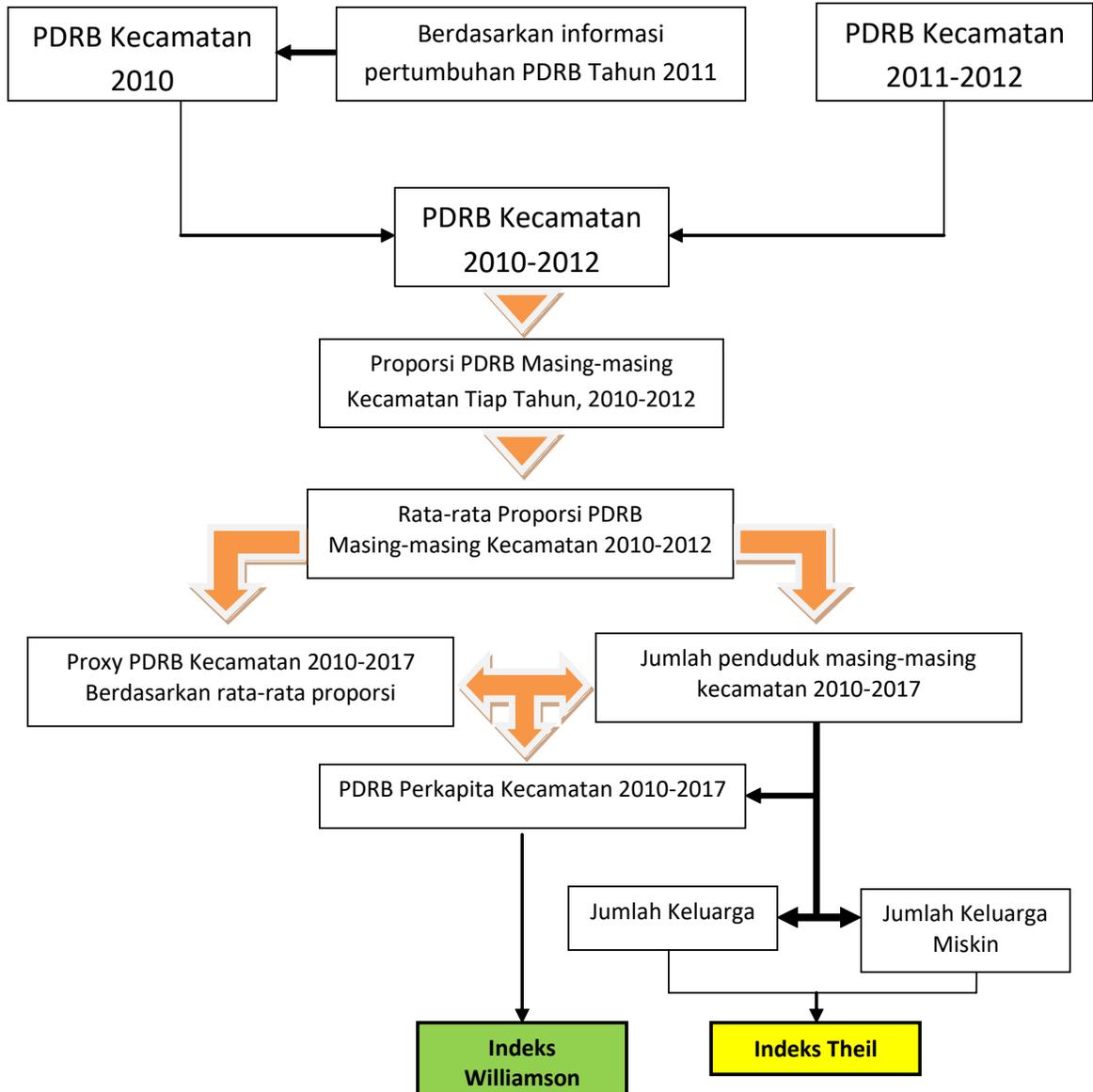
- d. Jumlah keluarga miskin (prasejahtera) per kecamatan (Kota Surakarta Dalam Angka)

Berdasarkan ketersediaan data di atas, pendekatan yang dipergunakan adalah: (1) pendekatan proporsi PDRB dan (2) pendekatan proporsi jumlah penduduk. Untuk pendekatan proporsi PDRB, pendekatan ini memiliki asumsi bahwa proporsi PDRB per kecamatan selama 2010-2017 adalah sama, berdasarkan pertimbangan perhitungan deviasi standar dan koefisien variasi yang kecil.

3.7.3. Prosedur Penentuan PDRB Kecamatan

- Pendekatan Proporsi PDRB
 - a. Pertama, dilakukan pengolahan data untuk memperoleh informasi PDRB Kecamatan Tahun 2010-2012 sesuai dengan ketersediaan data.
 - b. Kedua, dilakukan penghitungan proporsi PDRB masing-masing kecamatan selama 2010-2012.
 - c. Ketiga, dilakukan penghitungan rata-rata proporsi PDRB masing-masing kecamatan selama 2010-2012.
 - d. Keempat, penggunaan rata-rata proporsi PDRB masing-masing kecamatan untuk proxy PDRB kecamatan.
- Pendekatan Proporsi Jumlah Penduduk
 - a. Pertama, dilakukan penghitungan proporsi penduduk per kecamatan terhadap jumlah penduduk Kota Surakarta selama 2010-2017.
 - b. Kedua, dilakukan prpxy PDRB Kecamatan dengan cara proporsi jumlah penduduk per kecamatan dikalikan PDRB Kota Surakarta selama 2010-2017

3.7.4. Kerangka Pikir Kajian



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Proxy PDRB Kecamatan

4.1.1. Pendekatan Proporsi PDRB

Berdasarkan informasi PDRB kecamatan di Kota Surakarta, PDRB Kecamatan Banjarsari adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya sedangkan PDRB terendah adalah PDRB Kecamatan Serengan. PDRB Kecamatan Pasar Kliwon dan Jebres terlihat tidak jauh berbeda pada tahun 2010 dan 2011 namun pada tahun 2012 PDRB Kecamatan Pasar Kliwon menunjukkan peningkatan yang cukup pesat.

Bila dilihat pertumbuhannya dari 2010 ke 2012, PDRB Pasar Kliwon mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 18,81% selama dua tahun tersebut. Pertumbuhan tertinggi kedua adalah PDRB Kecamatan Banjarsari yaitu sebesar 12,82% selama 2010-2012 dan untuk Kecamatan Laweyan, Serengan, serta Jebres pertumbuhannya relatif sama yaitu berkisar 11%.

Dari sisi proporsinya, Kecamatan Banjarsari memiliki proporsi tertinggi dikarenakan memang memiliki PDRB yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain. Selama 2010-2012, proporsi PDRB di setiap kecamatan terlihat konstan. Hal ini terlihat dari nilai deviasi standard dan koefisien variasi selama 2010-2012 yang sangat kecil. Dengan mempertimbangkan perhitungan ini, proporsi PDRB masing-masing kecamatan diasumsikan konstan sehingga proporsi tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan proxy PDRB masing-masing kecamatan selama 2010-2017.

Tabel 4.1.

PDRB Kecamatan Harga Konstan Tahun 2000

Kecamatan	2010	2011	2012
Laweyan	784,169.23	829,651.05	877,731.73
Serengan	675,682.80	720,058.65	756,457.37
Pasar Kliwon	1,039,284.43	1,155,634.77	1,234,778.37
Jebres	1,039,327.29	1,101,167.26	1,159,975.78
Banjarsari	1,465,599.29	1,556,319.89	1,653,533.21
PDRB	5,004,063.045	5,362,831.62	5,682,476.46

Sumber: PDRB Kecamatan Kota Surakarta, BPS Kota Surakarta

Tabel 4.2.

Proporsi PDRB Kecamatan Harga Konstan Tahun 2000

Kecamatan	2010	2011	2012	AVERAGE	STDEV	KOEF. VAR
Laweyan	0.1567	0.1547	0.1545	0.1553	0.0010	0.6476
Serengan	0.1350	0.1343	0.1331	0.1341	0.0008	0.5840
Pasar Kliwon	0.2077	0.2155	0.2173	0.2135	0.0042	1.9528
Jebres	0.2077	0.2053	0.2041	0.2057	0.0015	0.7198
Banjarsari	0.2929	0.2902	0.2910	0.2914	0.0011	0.3857

Sumber: PDRB Kecamatan Kota Surakarta, BPS Kota Surakarta, diolah.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka PDRB masing-masing kecamatan di Kota Surakarta dihitung proporsional sesuai dengan data PDRB Kota Surakarta 2010-2017. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Proxy PDRB Kecamatan Tahun 2010-2017

PDRB Kota Surakarta
(Harga Konstan 2010)

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB	21,469, 551.30	22,848, 439.42	24,123, 781.59	25,631, 681.32	26,984, 358.61	28,453, 493.87	29,966, 373.01	31,562, 980.46

Proxy PDRB Per
Kecamatan

Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Laweyan	3,334,0 30.31	3,548,1 59.37	3,746,2 08.66	3,980,3 72.07	4,190,4 30.82	4,418,5 74.46	4,653,5 11.13	4,901,4 50.06
Serengan	2,879,8 98.98	3,064,8 61.32	3,235,9 34.13	3,438,2 01.93	3,619,6 48.39	3,816,7 16.37	4,019,6 52.10	4,233,8 19.04
Pasar Kliwon	4,583,5 60.24	4,877,9 40.72	5,150,2 15.05	5,472,1 38.37	5,760,9 23.07	6,074,5 70.51	6,397,5 56.89	6,738,4 18.53
Jebres	4,416,7 30.02	4,700,3 95.78	4,962,7 60.00	5,272,9 66.11	5,551,2 39.76	5,853,4 71.22	6,164,7 01.70	6,493,1 56.82
Banjarsari	6,255,3 31.75	6,657,0 82.23	7,028,6 63.75	7,468,0 02.83	7,862,1 16.57	8,290,1 61.31	8,730,9 51.19	9,196,1 36.01
PDRB	21,469, 551.30	22,848, 439.42	24,123, 781.59	25,631, 681.32	26,984, 358.61	28,453, 493.87	29,966, 373.01	31,562, 980.46

Pendekatan Proporsi PDRB

4.1.2. Pendekatan Proporsi Jumlah Penduduk

Proporsi penduduk masing-masing kecamatan di Kota Surakarta menunjukkan bahwa Kecamatan Banjarsari memiliki jumlah penduduk terbanyak sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Serengan. Rata-rata proporsi penduduk di Kecamatan Banjarsari berkisar 31%. Proporsi penduduk Kecamatan Jebres terlihat lebih besar dibandingkan Kecamatan Pasar Kliwon sepanjang 2010-2017, namun distribusi PDRB Kecamatan Pasar Kliwon justru lebih besar dibandingkan dengan Kecamatan Jebres.

Tabel 4.4.
Distribusi Proporsi Penduduk Kecamatan di Kota Surakarta
Tahun 2010-2017

Penduduk	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Laweyan	0.1723	0.1785	0.1882	0.1866	0.1865	0.1871	0.1900	0.1792
Serengan	0.0874	0.0953	0.1051	0.1045	0.1038	0.1047	0.1080	0.0959
Pasar Kliwon	0.1487	0.1555	0.1488	0.1558	0.1548	0.1579	0.1516	0.1505
Jebres	0.2765	0.2550	0.2563	0.2535	0.2512	0.2521	0.2477	0.2563
Banjarsari	0.3150	0.3157	0.3015	0.2995	0.3037	0.2983	0.3026	0.3180

Sumber: BPS Kota Surakarta, diolah

Dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk di masing-masing kecamatan selama 2010-2017, maka proxy PDRB masing-masing kecamatan selama 2010-2017 dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Proxy PDRB Kecamatan Tahun 2010-2017
Pendekatan Proporsi Jumlah Penduduk

Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Laweyan	3,700,132.70	4,077,942.24	4,540,673.30	4,783,410.75	5,033,349.01	5,323,248.28	5,694,902.03	5,656,482.08
Serengan	1,876,977.81	2,177,747.80	2,535,766.29	2,678,323.02	2,800,148.35	2,977,717.44	3,235,078.55	3,028,201.25
Pasar Kliwon	3,193,149.97	3,553,320.57	3,589,823.06	3,993,559.59	4,177,736.64	4,492,112.61	4,543,407.48	4,751,767.98
Jebres	5,935,629.54	5,826,388.91	6,183,032.15	6,498,563.65	6,778,199.23	7,173,832.62	7,424,054.60	8,089,317.30
Banjarsari	6,763,661.28	7,213,039.91	7,274,486.79	7,677,824.30	8,194,925.37	8,486,582.92	9,068,930.34	10,037,211.85
PDRB	21,469,551.30	22,848,439.42	24,123,781.59	25,631,681.32	26,984,358.61	28,453,493.87	29,966,373.01	31,562,980.46

4.2. Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antarkecamatan

Berdasarkan data di atas, ketimpangan distribusi pendapatan antarkecamatan di Kota Surakarta disajikan sebagaimana tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut rata-rata nilai indeks Williamson terkecil dengan pendekatan proporsi PDRB adalah Kecamatan Banjarsari dan terbesar adalah Kecamatan Jebres. Apabila diukur dengan menggunakan pendekatan proporsi jumlah penduduk, yang terbesar justru Kecamatan Banjarsari sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Laweyan. Perbedaan hasil ini muncul akibat perbedaan proxy PDRB per kecamatan. PDRB kecamatan yang dihitung dengan menggunakan proporsi jumlah penduduk sangat dipengaruhi oleh besarnya penduduk di masing-masing kecamatan.

Bila kedua pendekatan tersebut dihitung rata-ratanya, maka terlihat nilai indeks Williamson untuk masing-masing kecamatan masih tergolong rendah. Nilai indeks tertinggi terjadi di Kecamatan Banjarsari sedangkan yang terendah di Kecamatan Laweyan.

Tabel 4.6.
Indeks Williamson Tahun 2010-2017
Pendekatan Proporsi PDRB

Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
Laweyan	0.077 52	0.080 84	0.096 47	0.090 95	0.091 56	0.091 05	0.097 38	0.083 78	0.088 69
Serengan	0.113 79	0.095 08	0.065 76	0.070 44	0.072 01	0.070 89	0.059 44	0.091 12	0.079 81
Pasar Kliwon	0.113 99	0.108 78	0.135 89	0.118 42	0.120 09	0.113 71	0.131 72	0.121 31	0.120 49
Jebres	0.172 67	0.126 36	0.123 25	0.115 91	0.112 68	0.112 44	0.104 93	0.130 11	0.124 79
Banjarsari	0.092 76	0.079 92	0.049 03	0.042 25	0.050 66	0.038 71	0.046 76	0.085 67	0.060 72

Tabel 4.7.
Indeks Williamson Tahun 2010-2017
Pendekatan Proporsi Jumlah Penduduk

Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
Laweyan	0.057 41	0.045 46	0.025 55	0.028 90	0.029 09	0.027 93	0.021 70	0.044 00	0.035 00
Serengan	0.166 43	0.161 60	0.153 82	0.154 37	0.155 00	0.154 23	0.151 21	0.161 16	0.157 22
Pasar Kliwon	0.098 86	0.087 71	0.098 74	0.087 22	0.088 88	0.083 69	0.094 20	0.095 94	0.091 91
Jebres	0.201 03	0.138 87	0.142 52	0.134 78	0.128 28	0.130 86	0.118 83	0.142 49	0.142 21
Banjarsari	0.322 83	0.325 01	0.278 82	0.272 41	0.285 71	0.268 32	0.282 32	0.332 73	0.296 02

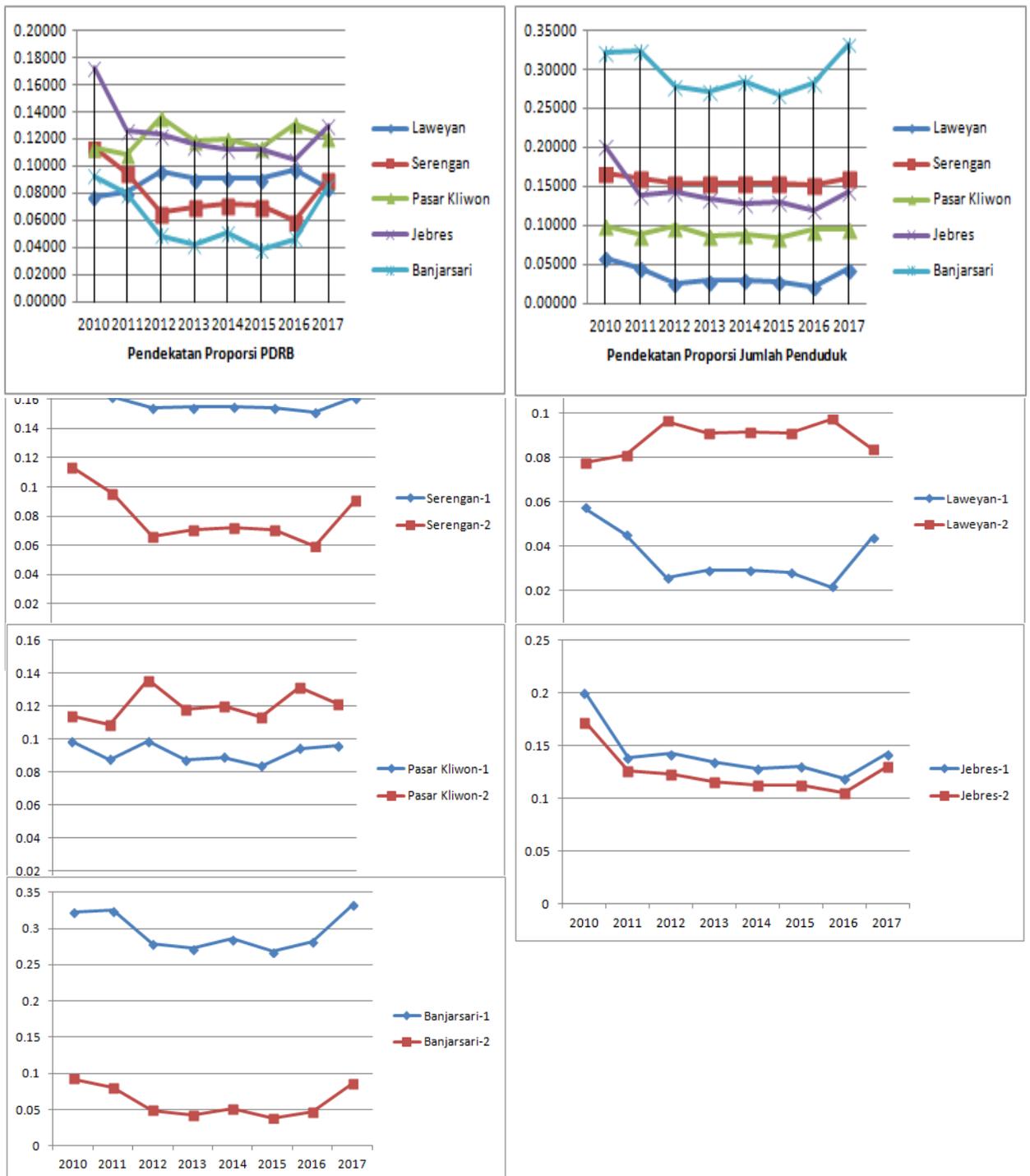
Tabel 4.8.
Indeks Williamson Tahun 2010-2017
Pendekatan Rata-rata dari Proporsi PDRB dan Jumlah Penduduk

Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
Laweyan	0.067 47	0.063 15	0.061 01	0.059 92	0.060 32	0.059 49	0.059 54	0.063 89	0.061 85
Serengan	0.140 11	0.128 34	0.109 79	0.112 40	0.113 50	0.112 56	0.105 33	0.126 14	0.118 52
Pasar Kliwon	0.106 43	0.098 25	0.117 31	0.102 82	0.104 49	0.098 70	0.112 96	0.108 62	0.106 20
Jebres	0.186 85	0.132 61	0.132 89	0.125 34	0.120 48	0.121 65	0.111 88	0.136 30	0.133 50
Banjarsari	0.207 80	0.202 47	0.163 92	0.157 33	0.168 19	0.153 51	0.164 54	0.209 20	0.178 37

Secara grafis, pendekatan proporsi PDRB dan pendekatan proporsi jumlah penduduk dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Dari sisi pola fluktuasinya, kedua pendekatan tersebut menunjukkan pergerakan tidak jauh berbeda namun dari sisi nilainya menunjukkan adanya perbedaan. Hanya Kecamatan Laweyan yang menunjukkan pola yang berbeda, bahkan berkebalikan diantara kedua pendekatan tersebut.

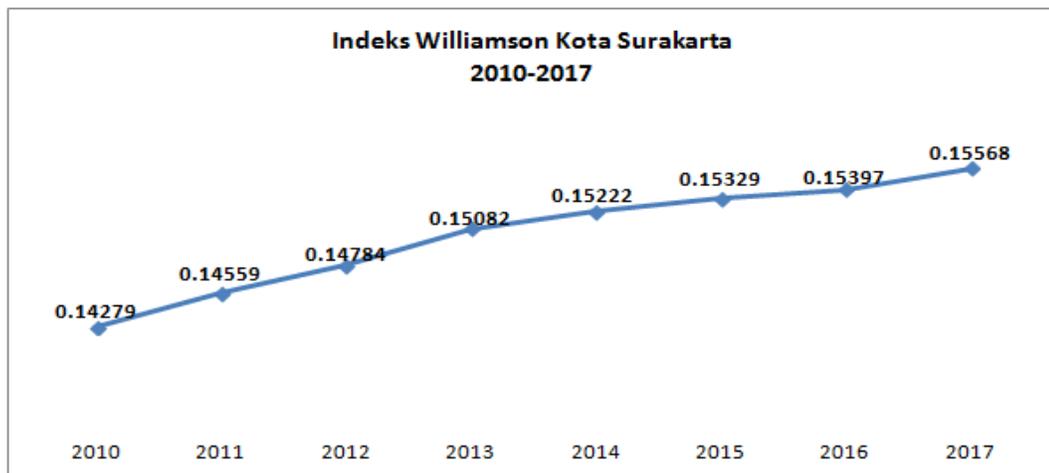
Untuk pola fluktuasi pada masing-masing kecamatan, grafik warna biru menunjukkan pendekatan proporsi jumlah penduduk sedangkan warna merah menunjukkan pendekatan proporsi PDRB.

Grafik 2.4.
Pola Fluktuasi Indeks Williamson antar Kecamatan



Nilai indeks Williamson di masing-masing kecamatan apabila dikaitkan dengan nilai indeks Williamson untuk Kota Surakarta terlihat tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaannya adalah indeks Williamson untuk Kota Surakarta menunjukkan tren yang terus naik sepanjang 2010-2017 sementara antar kecamatan menunjukkan pola mirip huruf “U” pada periode yang sama. Indeks Williamson Kota Surakarta dihitung berdasarkan data seluruh daerah di Jawa Tengah, sementara indeks Williamson kecamatan dihitung berdasarkan rata-rata seluruh kecamatan di Kota Surakarta.

Grafik 2.5.
Indeks Williamson Kota Surakarta Tahun 2010-2017



4.3. Konsentrasi Kemiskinan

Konsentrasi kemiskinan dihitung menggunakan indeks Theil serta data rumah tangga miskin. Data rumah tangga miskin ini dipergunakan sebagai proxy dari jumlah keluarga miskin di masing-masing kecamatan, artinya jumlah penduduk miskin di masing-masing kecamatan dapat tercermin dari banyaknya keluarga miskin.

Tabel 4.9.
Jumlah Keluarga Miskin Masing-masing Kecamatan di Surakarta
Tahun 2012-2017

JUMLAH KELUARGA MISKIN

Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Laweyan	2132	1954	1388	1194	1127	1127
Serengan	977	1230	905	714	578	578
Pasar Kliwon	1408	1462	1801	1634	1376	1452
Jebres	3218	3112	3259	3189	2752	2753
Banjarsari	3765	4064	2906	3519	2381	2831
Jumlah	11500	11822	10259	10250	8214	8741
Rata-rata	2300	2364.4	2051.8	2050	1642.8	1748.2

**JUMLAH KELUARGA DI
SURAKARTA**

Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Laweyan	21,810	29,895	30,167	21,876	20,648	20,649
Serengan	11,522	16,686	16,735	11,855	9,595	9,595
Pasar Kliwon	17,509	25,058	25,476	18,675	15,724	16,662
Jebres	32,321	43,179	43,800	35,936	31,009	31,011
Banjarsari	39,300	52,053	53,594	42,894	34,507	34,508
JUMLAH	122,462	166,871	169,772	131,236	111,483	112,425
RATA2	24,492	33,374	33,954	26,247	22,297	22,485

Berdasarkan data di atas, nilai indeks Theil masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Semakin tinggi nilai indeks Theil, semakin tinggi pula konsentrasi kemiskinan yang terjadi di kecamatan tersebut. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat dua kecamatan yang memiliki nilai indeks Theil di atas 1, yaitu Kecamatan Jebres dan Banjarsari. Hal ini mengindikasikan bahwa konsentrasi kemiskinan di kedua kecamatan tersebut tinggi dibanding

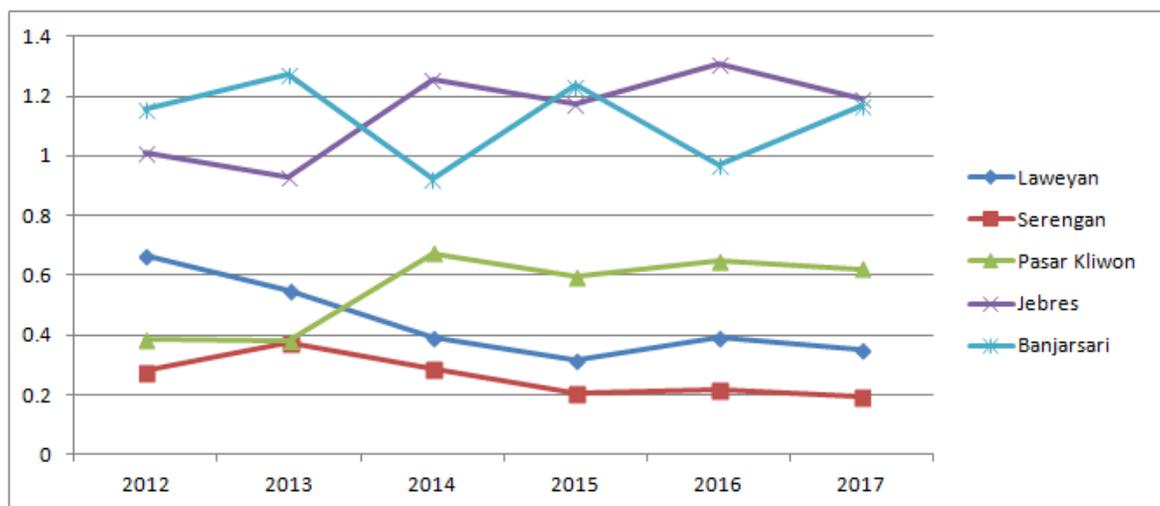
kecamatan lain. Kecamatan Serengan merupakan kecamatan dengan nilai indeks Theil terkecil.

Berdasarkan grafik indeks Theil terlihat bahwa indeks Theil di Kecamatan Laweyan dan Serengan selama 2012-2017 menunjukkan tren yang menurun, sementara Kecamatan Pasar Kliwon dan Jebres menunjukkan tren yang naik. Kecamatan Banjarsari sendiri berfluktuasi selama 2012-2017.

Tabel 4.10
 Nilai Indeks Theil Masing-masing Kecamatan di Surakarta
 Tahun 2010-2017

Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Laweyan	0.6640763	0.548735	0.392756	0.31646	0.390121	0.3515326
Serengan	0.2780798	0.372586	0.287032	0.204133	0.215152	0.1944591
Pasar Kliwon	0.3866581	0.380069	0.673346	0.596442	0.648029	0.6216899
Jebres	1.0134948	0.929792	1.253759	1.173589	1.306286	1.1914059
Banjarsari	1.1583856	1.273941	0.923312	1.236494	0.971758	1.1696649

Grafik 2.6.
 Pola Nilai Indeks Theil Masing-masing Kecamatan di Surakarta
 Tahun 2012-2017



Bila dikaitkan antara indeks Williamson dan indeks Theil, terlihat bahwa kedua indeks tersebut memiliki hubungan yang negative, yaitu semakin tinggi konsentrasi kemiskinan, semakin rendah tingkat ketimpangan dan sebaliknya. Meski demikian, nilai koefisien korelasi keduanya untuk semua kecamatan adalah kecil, sehingga antara ketimpangan dengan konsentrasi kemiskinan tidak memiliki hubungan yang kuat. Di Kota Surakarta, permasalahan konsentrasi kemiskinan dengan permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan adalah dua masalah yang berbeda, sehingga memerlukan kebijakan dan strategis yang berbeda pula. Koefisien regresi antara indeks Theil dengan indeks Williamson (yang menggunakan beberapa pendekatan) menunjukkan lemahnya hubungan tersebut.

Theil-Williamson
Gabungan

Kecamatan	Koef. Korelasi
Laweyan	-0.0656
Serengan	-0.2541
Pasar Kliwon	-0.2139
Jebres	-0.5136
Banjarsari	-0.0683

Theil-Williamson
(Proporsi PDRB)

Kecamatan	Koef. Korelasi
Laweyan	0.4558
Serengan	-0.2542
Pasar Kliwon	-0.2472
Jebres	-0.3930
Banjarsari	-0.0374

Theil-Williamson
(Proporsi Jumlah
Pednuduk)

Kecamatan	Koef. Korelasi
Laweyan	-0.3202
Serengan	-0.2522
Pasar Kliwon	-0.1465
Jebres	-0.6188
Banjarsari	-0.0906

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

1. Secara umum, kinerja makroekonomi Kota Surakarta bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah cukup bagus. Beberapa indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita riil, garis kemiskinan dan tingkat kemiskinan, serta tingkat pengangguran, menunjukkan kinerja makroekonomi Kota Surakarta masuk dalam peringkat atas.
2. Angka ketimpangan distribusi pendapatan Kota Surakarta menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini terlihat dari nilai indeks Gini maupun pengukuran menggunakan indeks Williamson.
3. Meskipun beberapa kasus menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta memiliki relevansi dengan tingkat ketimpangan, namun hal ini tidak terjadi di Kota Surakarta berdasarkan pengukuran nilai koefisien korelasi. Dengan demikian, permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surakarta tidak berkorelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi, namun oleh factor lain.
4. Korelasi antara nilai indeks Williamson dengan indeks Theil di masing-masing kecamatan menunjukkan adanya korelasi negative dengan nilai yang sangat kecil sehingga permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masing-masing kecamatan tidak berkaitan dengan konsentrasi kemiskinan sehingga ketimpangan dan konsentrasi kemiskinan merupakan dua permasalahan yang berbeda.

5.2. REKOMENDASI

Kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu kebijakan tidak langsung, dan kebijakan yang langsung. Kebijakan tak langsung meliputi (1) upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial dan politik; (2) mengendalikan jumlah penduduk; (3) melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan kebijakan yang langsung mencakup: (1) pengembangan data dasar (base data) dalam penentuan kelompok sasaran (targeting); (2) penyediaan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan); (3) penciptaan kesempatan kerja; (4) program pembangunan wilayah; dan (5) pelayanan perkreditan.

Beberapa rumusan kebijakan yang perlu disusun oleh Kutai Barat adalah sebagai berikut:

A. Pengembangan basis data kemiskinan

Program	Arah
Penyusunan profil kemiskinan penduduk berdasarkan indikator dan kriteria yang jelas di setiap kecamatan	Dimilikinya basis data kemiskinan penduduk yang lengkap dan komprehensif di setiap kecamatan, sehingga memudahkan penyusunan strategi seras diperolehnya gambaran riil faktor-faktor penyebab kemiskinan yang (mungkin) berbeda di setiap wilayah

B. Pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang mampu mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat lokal

Program	Arah
Pengembangan usaha ekonomi rakyat di berbagai	Meningkatkan akses usaha masyarakat dalam rangka meningkatkan

wilayah sesuai dengan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama antar SKPD terkait	kesejahteraan
Peningkatan efisiensi dan efektivitas alokasi dana untuk pengembangan ekonomi masyarakat lokal	Memberdayakan usaha rakyat lokal dengan memanfaatkan sumberdaya manusia lokal dalam rangka menekan angka kemiskinan.
Pelatihan dan pendampingan manajemen usaha kecil secara periodik	Meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam mengembangkan pasar, sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal.
Optimalisasi dana APBD untuk mengembangkan kapasitas masyarakat lokal dalam ekonomi	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi kecil yang terdapat di setiap kampung, serta pengelolaan dana bantuan bergulir secara optimal

C. Pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat lokal

Program	Arah
Penyuluhan dan pelatihan secara periodik guna mendorong motivasi masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan aktivitas ekonomi	Memberikan kesadaran pentingnya upaya untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan memberikan rangsangan yang sesuai dengan situasi dan kondisi.
Pengembangan Balai Latihan Kerja sesuai dengan potensi ekonomi lokal	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembekalan keterampilan teknis sebagai langkah awal melakukan atau mengembangkan usaha
Peningkatan <i>link and match</i> antara dunia	Mengembangkan sekolah kejuruan serta memperluas media praktik siswa

pendidikan dengan dunia usaha	agar siap kerja setelah lulus, sehingga mengurangi pengangguran dan kemiskinan dalam jangka panjang.
Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui penyuluhan dan bimbingan, dan layanan KB dalam rangka peningkatan kesejahteraan	Memberikan kesadaran kepada penduduk tentang semakin beratnya beban daerah dan keluarga apabila jumlah penduduk tidak diatur.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (2017). www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2017). www.jatengprov.bps.go.id
- BPS Kota Surakarta (2017). Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta 2010-2016.
- BPS Kota Surakarta (2017). Kota Surakarta dalam Angka
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta (2017). *Data Kependudukan Kota Surakarta*.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2017). *Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan*.
- Pemerintah Kota Surakarta (2018). *Realisasi APBD 2017 Kota Surakarta*.
- Cahyadin, Malik. 2010. Modul Analisis Ekonomi Pembangunan. Jurusan Ekonomi Pembangunan FE UNS. Hal 4-10. Surakarta.
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus. (1995). *Makro-Ekonomi*. Edisi ke-empat belas, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Soepono, Prasetyo. 1993. Analisis *Shift-Share*: Perkembangan dan Penerapan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vo. VIII No. 1 Hal. 43 – 54. Yogyakarta.